



G20

INDONESIA
2022

G20pedia

[g20.org](https://www.g20.org)

Indeks

Sekilas G20

1. Apa Itu G20?	7
2. Negara Mana Saja Anggota G20?	8
3. Siapa Pemimpin G20?	13
4. Di Mana Kantor Pusat/Sekretariat G20?	13
5. Seberapa Penting G20?	14
6. Sejak Kapan G20 Berdiri?	14
7. Apa Saja Isu yang Dibahas dalam G20?	15
8. Apa itu <i>Finance Track</i> ?	15
9. Apa itu <i>Sherpa Track</i> ?	16
10. Apa Saja Agenda/Pertemuan dalam G20?	18
11. Apa Saja Peran Nyata G20 Selama Ini?	23

Presidensi G20 Indonesia

1. Apakah Indonesia Resmi Sebagai PRESIDENSI G20?	26
2. Di Mana PRESIDENSI G20 Indonesia Diadakan?	27
3. Siapa yang Akan Hadir pada KTT G20?	27
4. Apakah Seluruh Rangkaian Kegiatan G20 Hanya Akan Dilaksanakan di Bali?	30
5. Bagaimana Kiprah Indonesia di G20?	31
6. Seperti Apa Posisi Indonesia di G20?	31
7. Berapa Banyak Delegasi yang Akan Hadir pada G20 Indonesia?	32
8. Apa Makna yang Dibawa dalam Logo PRESIDENSI G20 Indonesia?	33
9. Apa Tema PRESIDENSI G20 Kali Ini?	34
10. Apa Isu Prioritas yang Dibahas pada PRESIDENSI G20?	36
11. Apa Saja Peran Aktif Indonesia di G20?	37
12. Apa Manfaat Sebagai PRESIDENSI G20?	37
13. Apakah G20 Punya Dampak Ekonomi yang Bagus untuk Indonesia?	39
14. Apakah Ada Pembahasan Terkait SDM dan <i>Sustainability</i> di Forum G20?	41
15. Mengapa Lapangan Kerja Berkelanjutan Jadi Agenda Penting bagi Indonesia di G20?	42

Indeks

16. Apakah Presidensi Indonesia Membahas Isu Terkait Lapangan Kerja bagi Pemuda?	44
17. Apakah Presidensi Indonesia Membahas Isu Terkait Pemberdayaan Disabilitas?	45
18. Apakah Tantangan dan Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas Selama Ini?.....	46
19. Di Bidang SDM dan Ketenagakerjaan, Apa Saja Bahasan di Forum G20?	47
20. Adakah Pembahasan Terkait Perlindungan Tenaga Kerja di Forum G20?	49
21. Apa Target yang Ingin Dicapai Terkait Pembahasan Isu Perlindungan Tenaga Kerja dalam Forum G20?.....	50
22. Presidensi Indonesia di G20 Membahas PRR sebagai Sistem Kesehatan yang Tangguh. Apa itu PRR?	52
23. Mengapa Kesehatan Berkelanjutan (<i>Environment Suistanable Health System</i> /(ESHS) Menjadi Salah Satu Bahasan dalam Forum G20? ..	53
24. Apa Saja Isu Pokok Terkait Pemanfaatan Sains dan Teknologi Transdisipliner Untuk Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Pandemi yang Diusung Indonesia dalam Forum G20?	55
25. Mengapa Transisi Energi, Kesadaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Menjadi Isu Penting dalam G20?.....	58
26. Apa Saja Peran G20 dalam Mengatasi Ketahanan Pangan Global?.	60
27. Bentuk Nyata Presidensi G-20 Indonesia dalam Dukungan Pemulihan Ekonomi Global?	62
28. Apa Saja Tanggung Jawab Indonesia sebagai Pengampu <i>Digital Economy Working Group</i> (DEWG) dalam Presidensi G20?	64
29. Mengapa G20 Memandang Literasi dan Kecakapan Digital sebagai Poin Penting dalam Pemulihan Pascapandemi Covid-19?	66
30. Apakah Forum G20 Membahas Persoalan Arus Data Lintas Batas Negara?	68
31. Apakah Forum G20 Membahas Uang Digital sebagai Alat Bertransaksi di Masa Depan?	69
32. Apa Saja Tugas dan Bahasan Mengenai Perempuan dalam Kelompok Kerja W20?	71
33. Apa Saja Langkah Pemerintah dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang Sebagian Besar Adalah Perempuan? 73	

Indeks

34. Apa Saja Bahasan Mengenai Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Presidensi G20 Indonesia?	75
35. Apakah yang Dimaksud dengan <i>Glass Ceiling</i> ?	77
36. Apa Saja Manfaat Presidensi G20 Indonesia di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?	80
37. Seberapa Signifikan Subsektor Ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional?	82
38. Sejauh Mana Indonesia Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan?	83
39. Berapa Alokasi Anggaran Indonesia untuk Menghadapi Perubahan iklim?	87
40. Apakah Indonesia Diuntungkan dari Perdagangan Karbon Global?..	89
41. Apa Saja Komitmen Negara Anggota G20 dalam Perubahan Iklim? ..	91
42. Bagaimana Rencana Penggunaan Mobil Listrik pada Penyelenggaraan G20?	96
43. Apakah Upaya Pemerintah dalam Mempercepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik?	98
44. Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Energi Bersih, Khususnya pada Generasi Muda? ...	100
45. Apa Saja Agenda Prioritas Pemerintah di Sektor Pendidikan dalam Presidensi G20?	104
46. Kenapa Gotong Royong Dipilih untuk Diadopsi Negara G20 dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan Berkualitas?	106
47. Bagaimana Upaya Pemerintah Melakukan Pemerataan Teknologi Digital dalam Bidang Pendidikan?	108
48. Kenapa Topik Antikorupsi Menjadi Pembahasan Penting di Presidensi G20 Indonesia?	116
49. Seperti Apa Upaya Indonesia Melalui KPK Memanfaatkan Momentum G20 dalam Pemberantasan Korupsi?	118
50. Seperti Apa Peran Generasi Muda dalam Upaya Pemberantasan Korupsi?.....	121
51. Bagaimana Wujud Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Kesehatan Masyarakat?	126
52. Apakah yang Dihasilkan oleh <i>Joint Finance and Health Task Force</i> dalam Forum G20?.....	128
53. Bagaimana Realisasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia?.....	130

Indeks

54. Apakah Pemerintah Melibatkan Pihak Swasta dalam Penanganan Covid-19?	132
55. Bagaimana Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan Sebagai Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?	137
56. Apakah Program Kartu Prakerja Membantu Pemerintah Mencapai Tujuan SDGs?	139
57. Apa Bukti Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup?	141
58. Apakah Dampak Positif dari Pelaksanaan Side Event G20 bagi Masyarakat?	147
59. Apa Fungsi Creative Hub Puncak Waringin?	149
60. Apa Strategi dalam Pengembangan DSP Borobudur?	151
61. Mengapa G20 Fokus Membahas Masalah Akses Keuangan Digital Bagi Generasi Muda?	157
62. Apa Harapan Indonesia Terkait Literasi Keuangan Digital dalam Forum G20?	159
63. Upaya Pengenalan Literasi Keuangan melalui Gamifikasi	161
64. Apakah Manfaat Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan?	167
65. Apa Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Kemajuan Wirausaha Tanah Air?	169
66. Apa Upaya Indonesia untuk Tingkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja?	171
67. Apa Bentuk Usulan Indonesia untuk Pendanaan Kebudayaan Secara Global dalam Presidensi G20?	177
68. Tentang Dana Indonesiana	179
69. Apa Manfaat Culture Recovery Fund yang Disalurkan Pemerintah Inggris?	181
70. Sejauh Mana Implementasi & Kemajuan dari Sendai Framework? ..	187
71. Mengapa PBB Meminta Negara G20 Berinvestasi di Manajemen Kebencanaan?	189
72. Apa Usaha Swedia Memitigasi Ancaman Bencana di Laut Baltik? ..	191
73. Apa Pembahasan Utama Pertemuan Kedua DWG G20?	197
74. Bagaimana Cara Indonesia Memenuhi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan?	199

Indeks

75. Pentingnya Kemampuan Public Speaking Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?	201
76. Apa peran B20 Woman in BusinessAction Council dalam Memberdayakan dan Mendukung Perempuan dalam Dunia Bisnis? 207	
77. Bagaimana Peran Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Perempuan, Khususnya Pengarusutamaan Gender?	209
78. Bagaimana Perjalanan Penguatan Peran Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi di Dunia?	211
79. Apa Hasil Dari Pertemuan Kedua EdWG G20?	217
80. Apa Tindak Lanjut dari Laporan Hasil G20 Bidang Pendidikan?	219
81. Teknologi Semakin Canggih, Apakah Guru Masih Menjadi Satu-satunya Kunci Sukses Pembelajaran?	221
82. Apakah Ada Website Resmi G20?	224
83. Apa Saja Media Sosial G20?	224
84. Glosarium G20?	225



Sekilas G20

1. Apa Itu G20?

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju.



2. Negara Mana Saja Anggota G20?

Anggota G20 terdiri negara-negara dari berbagai Kawasan di dunia.

Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.



Profil Negara Anggota G20

Argentina

Ibukota Buenos Aires

PDB 383,07 Miliar Dolar AS (2020)

Mata Uang Peso Argentina (ARS)

Luas Wilayah 2,78 juta km²

Jumlah Penduduk 45,38 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian terbesar adalah jasa, manufaktur, agribisnis, peternakan. Industri utama meliputi pengolahan makanan, produksi mobil, tekstil, produksi energi, pertambangan, kimia

Australia

Ibukota Canberra

PDB 1,331 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Dolar Australia (AUD)

Luas Wilayah 7,692 juta km²

Jumlah Penduduk 25,69 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian utama Australia berupa logam dan pertambangan, keuangan, konsultasi bisnis, energi dan utilitas, dan kesehatan.

Brasil

Ibukota Brasilia

PDB 1,363 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Real Brasil (BRL)

Luas Wilayah 8,516 juta km²

Jumlah Penduduk 212,6 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian dari sektor pertambangan, pertanian, dan manufaktur. Brazil adalah produsen kedelai, kopi, kakao, gula, jagung, singkong, jeruk, pisang, nanas, tembakau, dan kapas.

Kanada

Ibukota Ottawa

PDB 1,643 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Dolar Kanada (CAD)

Luas Wilayah 9,985 juta km²

Jumlah Penduduk 38,01 juta jiwa (2020)

Industri utama adalah bidang jasa, manufaktur, dan sektor sumber daya alam. Ekspor teratas Kanada adalah minyak mentah, mobil, emas, dan suku cadang kendaraan.

Tiongkok

Ibukota Beijing

PDB 14,72 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Renminbi (CNY)

Luas Wilayah 9,597 juta km²

Jumlah Penduduk 1,402 miliar jiwa (2020)

Perekonomian terbesar Tiongkok dari manufaktur, jasa, dan pertanian. Sektor jasa (hampir 50% PDB) mencakup perdagangan, ritel, pos, dll. Industri utama termasuk pertambangan dan pengolahan bijih, besi dan baja, aluminium, batu bara, mesin, persenjataan, tekstil dan pakaian jadi, minyak bumi, semen, bahan kimia, pupuk, pengolahan makanan, mobil dan peralatan transportasi lainnya.

Jerman

Ibukota Berlin

PDB 3,806 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Euro (EUR)

Luas Wilayah 357.386 km²

Jumlah Penduduk 83,24 juta jiwa (2020)

Industri utama Jerman meliputi pembuatan mesin, mobil, teknik listrik dan elektronik, bahan kimia, dan pengolahan makanan.

Prancis

Ibukota Paris

PDB 2,603 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Euro (EUR)

Luas Wilayah 543.940 km²

Jumlah Penduduk 67,39 juta jiwa (2020)

Perekonomian Prancis meliputi pariwisata, manufaktur, dan farmasi. Menurut data OEC, ekspor utama Prancis adalah pesawat, helikopter, dan/atau pesawat ruang angkasa, obat-obatan dalam kemasan, mobil, turbin gas, dan suku cadang kendaraan.

India

Ibukota New Delhi

PDB 2,623 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Rupee India (INR)

Luas Wilayah 3,287 juta km²

Jumlah Penduduk 1,38 miliar jiwa (2020)

Sektor terpenting dalam perekonomian India adalah pertanian, yakni sumber mata pencaharian utama 58% penduduk.

Indonesia

Ibukota Jakarta

PDB 1,058 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Rupiah Indonesia (IDR)

Luas Wilayah 1.922.570 km²

Jumlah Penduduk 273,5 juta jiwa (2020)

Sektor industri utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam, tekstil dan pakaian jadi, pertambangan, alas kaki, kayu lapis, karet dan pupuk kimia.

Italia

Ibukota Roma

PDB 1,886 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Euro (EUR)

Luas Wilayah 301,340 km²

Jumlah Penduduk 59,55 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian di Italia termasuk produksi mesin, bahan kimia, mobil dan tekstil. Desain mode dan pariwisata juga menjadi sumber pendapatan yang penting.

Jepang

Ibukota Tokyo

PDB 5,05 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Yen Jepang (JPY)

Luas Wilayah 377.975 km²

Jumlah Penduduk 125,8 juta jiwa (2020)

Ekspor utama Jepang adalah mobil, suku cadang kendaraan, sirkuit terpadu, mesin, dan kapal penumpang dan kargo.

Meksiko

Ibukota Kota Meksiko

PDB 1,07 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Peso Meksiko (MXN)

Luas Wilayah 1,973 juta km²

Jumlah Penduduk 128,9 juta jiwa (2020)

Ekspor utama Meksiko adalah perak, buah-buahan, sayuran, kopi, kapas, minyak dan produk minyak.

Rusia

Ibukota Moscow

PDB 1,483 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Rubel Rusia (RUB)

Luas Wilayah 17,13 juta km²

Jumlah Penduduk 144,1 juta jiwa (2020)

Perekonomian Rusia bersumber dari minyak dan gas alam. Ekspor utama Rusia adalah energi (produk minyak dan minyak bumi, gas, batu bara), baja, logam dan mineral besi.

Arab Saudi

Ibukota Riyadh

PDB 700,1 Miliar Dolar AS (2020)

Mata Uang Riyal Saudi (SAR)

Luas Wilayah 2,15 juta km²

Jumlah Penduduk 34,81 juta jiwa (2020)

Arab Saudi adalah pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Sektor perminyakan menyumbang sekitar 87% dari pendapatan Arab Saudi, yang merupakan 42% dari PDB.

Afrika Selatan

Ibukota Pretoria (administrasi),

Cape Town (legislatif), dan

Bloemfontein (yudisial)

PDB 301,9 Miliar Dolar AS (2020)

Mata Uang Rand Afrika Selatan (ZAR)

Luas Wilayah 1,221 juta km²

Jumlah Penduduk 59,31 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian Afrika Selatan adalah dari sektor pertanian, industri dan jasa. Ekspor teratas Afrika Selatan adalah emas, platinum, mobil, bijih besi, dan briket batubara.

Korea Selatan

Ibukota Seoul

PDB 1,631 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Won Korea Selatan (KRW)

Luas Wilayah 100.210 km²

Jumlah Penduduk 51,78 juta jiwa (2020)

Industri terbesar di Korea Selatan adalah elektronik, mobil, telekomunikasi, pembuatan kapal, bahan kimia, dan baja. Ekspor utama Korea Selatan meliputi produk elektronik, mesin, mobil, baja, kapal, serta tekstil dan pakaian.

Turki

Ibukota Ankara

PDB 720,1 Miliar Dolar AS (2020)

Mata Uang Lira Turki (TRY)

Luas Wilayah 783.562 km²

Jumlah Penduduk 84,34 juta jiwa (2020)

Produk ekspor terbesar Turki berdasarkan nilai pada tahun 2020 adalah mobil, suku cadang atau aksesoris otomotif, truk, minyak minyak olahan, dan perhiasan.

Inggris (Britania Raya)

Ibukota London

PDB 2,708 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Pound Sterling (GBP)

Luas Wilayah 242,495 km²

Jumlah Penduduk 67,22 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian terbesar Inggris berasal dari jasa, manufaktur, konstruksi, dan pariwisata. Ekspor utama berupa emas, komoditas, turbin gas, mobil, dan minyak mentah.

Amerika Serikat

Ibukota Washington DC

PDB 20,94 Triliun Dolar AS (2020)

Mata Uang Dolar Amerika Serikat (USD)

Luas Wilayah 9,834 juta km²

Jumlah Penduduk 329,5 juta jiwa (2020)

Sumber perekonomian AS didominasi dari layanan di berbagai bidang, seperti teknologi, layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan ritel.

Uni Eropa

Uni Eropa adalah organisasi internasional dengan anggota 27 negara Eropa

PDB 15,73 Triliun Dolar AS (2021)

Mata Uang Euro (EUR)

Luas Wilayah 4,233 juta km²

Jumlah Penduduk lebih dari 500 juta jiwa

Ekonomi Uni Eropa mewakili 18,5% dari total PDB global. Uni Eropa mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan secara bersama bagi semua anggota.

3. Siapa Pemimpin G20?

G20 tidak memiliki pemimpin atau ketua tetap. Fungsi presidensi dipegang salah satu anggota selama satu tahun.

4. Di Mana Kantor Pusat/Sekretariat G20?

G20 tidak memiliki sekretariat tetap, karena itu koordinasi untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika yang terdiri dari negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya.

Kata *troika* berasal dari bahasa Rusia yang artinya tiga serangkai.

Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia, Italia (presidensi sebelumnya), dan India (kandidat presidensi berikutnya).



5. Seberapa Penting G20?

Forum internasional G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.



Populasi
Dunia



Perdagangan
Global



PDB
Dunia

6. Sejak Kapan G20 Berdiri?

G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi negara-negara anggota G7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang).

G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis yang berdampak global, seperti:

- *Mexican Peso crisis* 1994
- *Asian Financial Crisis* 1997/1998
- *Russian financial crisis* 1998
- *Financial Crisis* 2007-2008

7. Apa Saja Isu yang Dibahas dalam G20?

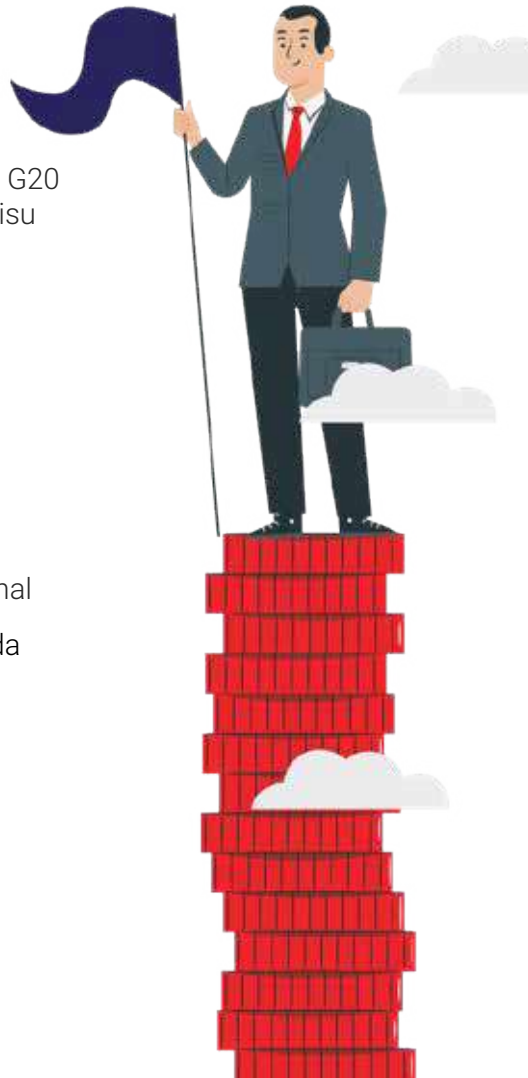
Forum G20 membahas dua arus isu yakni *Finance Track* dan *Sherpa Track*.

8. Apa Itu *Finance Track*?

Finance Track adalah jalur pembahasan dalam forum G20 yang berfokus pada fokus isu keuangan, antara lain

- Kebijakan fiskal
- Moneter dan riil
- Investasi infrastruktur
- Regulasi keuangan
- Inklusi keuangan
- Perpajakan internasional

Pertemuan-pertemuan pada *Finance Track* dihadiri oleh Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota.



9. Apa Itu *Sherpa Track*?

Sherpa Track adalah jalur pembahasan dalam forum G20 di bidang-bidang yang lebih luas di luar isu keuangan, antara lain:

- Anti korupsi
- Ekonomi Digital
- Lapangan Kerja
- Pertanian
- Pendidikan
- Urusan Luar Negeri
- Budaya
- Kesehatan
- Pembangunan
- Lingkungan
- Pariwisata
- Energi Berkelanjutan
- Perdagangan, Investasi, dan Industri
- Pemberdayaan Perempuan



Pembahasan dalam *Sherpa Track* lebih luas dan lebih dalam dan mendetail. Pertemuan-pertemuan dalam jalur ini dihadiri oleh delegasi-delegasi dari masing-masing negara anggota dalam tiga jenis pertemuan: pertemuan *working group*, *engagement group*, hingga pertemuan tingkat menteri.

Nama "*Sherpa*" berasal dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*).



10. Apa Saja Agenda/Pertemuan dalam G20?

- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/*Leaders' Summit* sebagai puncak dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan.
- Pertemuan Tingkat Menteri/*Ministerial Meetings* sesuai sektor pembahasan dalam *working groups*.
- *Deputies and Sherpa Meetings*. *Deputies meetings* adalah bagian dari *Finance Track*, sedangkan *Sherpa Meetings* adalah bagian dari *Sherpa Track*.
- Pertemuan Kelompok Kerja/*Working Groups Meetings*.
- Pertemuan yang membahas isu prioritas sektor yang diampu oleh kelompok kerja/*working groups*.



- *Engagement Groups Meetings* atau pertemuan forum dialog yang menjadi bagian dari G-20, membahas isu tertentu secara khusus.



Business 20 (B20) adalah forum komunitas bisnis internasional, sebagai peran swasta dalam penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat berkelanjutan dan berimbang.



Chair:
Shinta Widjaja Kamdani



theb20summit



B20



@b20



B20 Indonesia



b20indonesia2022.org



Civil 20 (C20) adalah forum organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk terlibat dengan para pemerintah di G20 dalam menghadapi isu-isu krusial dunia.



Chair:
Sugeng Bahagijo



Co-Chair:
Fabby Tumiwa



sherpag20indonesia.ekon.go.id/c20



Labour 20 (L20) adalah forum yang mewakili kepentingan tenaga kerja dengan mempersatukan serikat pekerja dari negara-negara G20 dan Global Unions untuk memberikan masukan pada G20.



Chair:
Elly Rosita Silaban



Co-Chair:
Maria
Emeninta



Parliamentary 20 (L20) adalah forum yang dihadiri *parliament speakers*/perwakilan rakyat (legislatif) dari negara-negara G20 bertujuan membawa dimensi parlementer ke tata kelola global, meningkatkan dukungan politik untuk komitmen internasional.



Chair:
Puan Maharani



Science 20 (S20) adalah forum peneliti dan ilmuwan dari seluruh negara G20 yang membahas keilmuan terkait peningkatan kesehatan global.



Chair:
Prof. Satryo
Sumantri
Brodjonegoro



Co-Chair:
Mego Pinandito

 sherpag20indonesia.ekon.go.id/s20



Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) adalah forum lembaga audit tertinggi negara-negara G20 untuk mempromosikan kerjasama, memperkuat transparansi dan akuntabilitas.



Chair:
Agung Firman
Sampurna



Co-chair:
Agus Joko
Pramono



SAI20



SAI20



@SAI20org



Sai20org



sai20.org



g20.org



Think 20 (T20) adalah forum *globalthink-tank* dan para ahli untuk menyajikan analisis komprehensif terkait diskusi yang sedang berlangsung di G20 dan menghasilkan ide-ide untuk mendukung G20 dalam menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.



Chair:
Prof. Djisman
Simanjuntak



Co-chair:
Riatu Maria
Qhibtiyyah



T20 Indonesia 2022



@T20Solutions



T20 Indonesia



T20 Indonesia



www.t20indonesia.org



Urban 20 (U20) adalah forum bagi para pemimpin pemerintah daerah kota-kota U20, diantaranya untuk melakukan aksi terhadap iklim global dan pembangunan berkelanjutan kepada para pemimpin nasional.



Chair:
Anies Baswedan



Co-chair:
Ridwan Kamil



www.urban20.org/u20summit/2022-jakarta



Women 20 (W20) adalah forum yang mewakili suara perempuan, mendorong pelibatan isu terkait perempuan ke dalam dokumen komitmen G20, termasuk isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan inklusif, serta kerja sama perempuan di sektor ekonomi internasional.



Chair:
Hadriani Uli
Silalahi



Co-chair:
Dian Siswarini



sherpag20indonesia.ekon.go.id/w20




Youth 20 (Y20) adalah forum konsultasi dan dialog para pemuda sebagai pemimpin masa depan untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global, bertukar ide, berargumen, bernegosiasi, hingga mencapai konsensus.





Chair:
Gracia
Paramitha




Co-chair:
Michael Victor
Sianipar

 [y20indonesia2022_](#)

 [y20-indonesia.org](#)

 Indonesian Youth Diplomacy

 Indonesian Youth Diplomacy



11. Apa Saja Peran Nyata G20 Selama Ini?

Penanganan Krisis Keuangan Global 2008

Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar.



Kebijakan Pajak

G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.



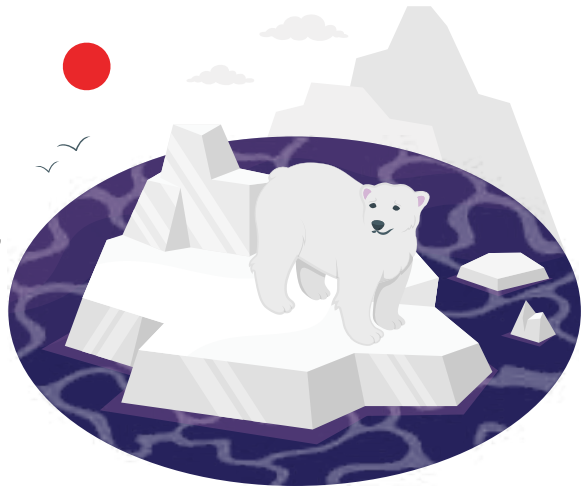
Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19

Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penanggulangan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (*Riyadh Declaration*), penurunan/ penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, *hand sanitizer*, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.



Isu lainnya

Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan.





**Presidensi G20
Indonesia**



1. Apakah Indonesia Telah Resmi Sebagai Presidensi G20?

Betul. Indonesia ditetapkan pada *Riyadh Summit 2020*, dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di kota Roma, Italia.

Secara resmi Presidensi G20 Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022.

2. Di Mana KTT G20 Indonesia Diadakan?

KTT G20 akan dilaksanakan di Bali.



3. Siapa Saja yang Akan Hadir pada KTT G20?

KTT G20 atau *G20 Leaders' Summit* akan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota dan negara undangan.

Negara-Negara Anggota



Alberto Fernández
Presiden Argentina



Anthony Albanese
Perdana Menteri Australia



Jair Bolsonaro
Presiden Brasil



Justin Trudeau
Perdana Menteri Kanada



Xi Jinping
Presiden Tiongkok



Emmanuel Macron
Presiden Prancis



Olaf Scholz
Kanselir Jerman



Narendra Modi
Perdana Menteri India



Joko Widodo
Presiden Indonesia
(Tuan Rumah)



Mario Draghi
Perdana Menteri Italia



Fumio Kishida
Perdana Menteri Jepang



Yoon Suk-yeol
Presiden Terpilih Korea Selatan



**Andrés Manuel López
Obrador**
Presiden Meksiko



Vladimir Putin
Presiden Rusia



**Salman bin Abdulaziz
Al Saud**
Raja Arab Saudi



Cyril Ramaphosa
Presiden Afrika Selatan



Recep Tayyip Erdoğan
Presiden Turki



Boris Johnson
Perdana Menteri Inggris



Joe Biden
Presiden Amerika Serikat



Charles Michel
Presiden Dewan Eropa
(Uni Eropa)



Ursula von der Leyen
Presiden Komisi Eropa
(Uni Eropa)

Tamu Undangan



Hun Sen
Perdana Menteri Kamboja
(Ketua ASEAN)



Paul Kagame
Presiden Rwanda
(Ketua NEPAD)



Macky Sall
Presiden Senegal
(Ketua African Union)



Pedro Sánchez
Perdana Menteri Spanyol
(Tamu Tetap G20)



Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Putra Mahkota Emirat Abu Dhabi

4. Apakah Seluruh Rangkaian Kegiatan G20 Hanya Akan Dilaksanakan di Bali?

Tidak. G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan (sekitar 157 pertemuan) yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota selain Bali akan dilibatkan, seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam - Bintan, Belitung, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya.



5. Bagaimana Kiprah Indonesia di G20?

Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997-1998 dan dinilai sebagai *emerging economy* yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia.

6. Seperti Apa Posisi Indonesia di G20?

Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia.

Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) di antara anggota G20.

Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru (*New Established Emerging Market*) dengan PDB di atas US\$ 1 Triliun.

7. Berapa Banyak Delegasi yang Akan Hadir pada G20 Indonesia?

Diperkirakan akan ada 20.988 delegasi yang akan hadir, dengan rincian:



429

delegasi
pada
KTT G20

4.581

delegasi pada
*Ministerial
Meetings*

1.212

delegasi pada
*Deputies/Sherpa
Meetings*

8.330

delegasi pada
*Working Groups
Meetings*

6.436

delegasi pada
*Engagement
Groups Meetings*

8. Apa Makna yang Dibawa dalam Logo Presidensi G20 Indonesia?

Logo G20 Indonesia terdiri dari beberapa elemen grafis yang memiliki makna, antara lain:

Motif Kawung Siluet Gunungan



Motif kawung bermakna semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama



Gunungan bermakna perpindahan babak menuju pemulihan ekonomi dunia lebih inklusif dan berkelanjutan

Warna Merah dan Biru



Warna merah pada gunungan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia



Warna biru pada tulisan G20 Indonesia Jati diri Indonesia sebagai negara maritim

Sulur Tanaman



Visi Indonesia mengenai representasi semangat pemulihan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan

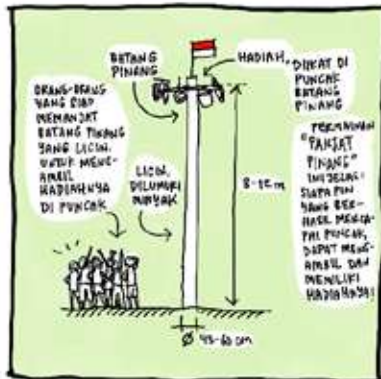


9. Apa Tema Presidensi G20 Indonesia Kali Ini?

Recover Together, Recover Stronger

Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.





10. Apa Isu Prioritas yang Dibahas pada Presidensi G20

Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama pada Presidensi G20 2022 yaitu:



11. Apa Saja Peran Aktif Indonesia di G20?

Indonesia berperan aktif dalam beberapa inisiatif di forum G20, seperti:

- *Global Expenditure Support Fund (GESF)*: dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas *Global Infrastructure*.
- *Connectivity Alliance (GICA)*: mendukung konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan.
- *Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA HUB)*: forum tempat berkumpulnya para start-up unicorn di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide.

12. Apa Manfaat Sebagai Presidensi G20?

- Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.
- Merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
- Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk

memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia.

- Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.
- Kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global.
- Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan.
- Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

13. Apakah G20 Punya Dampak Ekonomi yang Bagus untuk Indonesia?

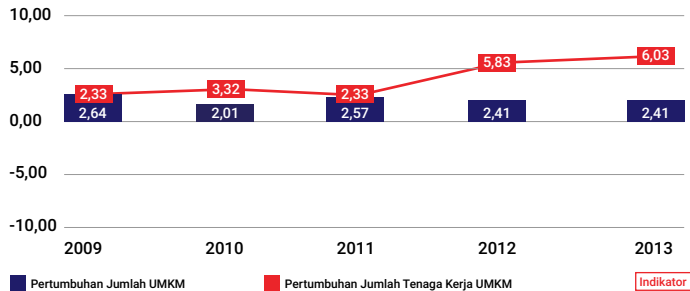
- Tentu saja. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi US\$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada PDB Indonesia.
- Peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.
- Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya.
- Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.
- Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20.

- Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain dengan UU Cipta Kerja, untuk meningkatkan kepercayaan investor global.
- Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila perekonomian dunia membaik, maka kita akan menerima dampak positifnya, salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi.
- Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan PNPB tumbuh lebih dari 23 persen.

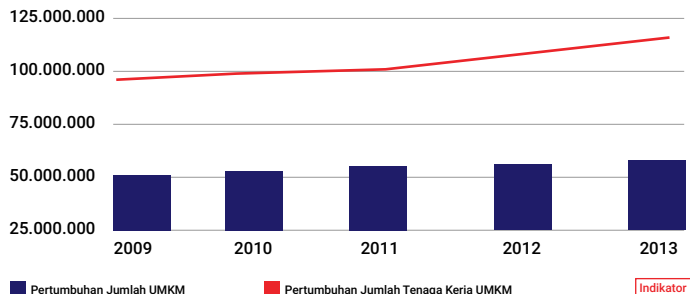
14. Apakah Ada Pembahasan Terkait SDM dan *Sustainability* di Forum G20?

Dalam Presidensi G20 Indonesia akan mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis/usaha dan menciptakan inovasi bisnis yang resilien, berkelanjutan dan berkembang serta mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan Jumlah UMKM dan Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM



Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM



15. Mengapa Lapangan Kerja Berkelanjutan Jadi Agenda Penting bagi Indonesia di G20?

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang.

Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah.



Komposisi Penduduk Indonesia Mayoritas Usia Kerja

270,20 Juta Jiwa



Baby Boomer

11,56%

Lahir 1946-1964,
usia sekarang 58-76 tahun



Pre Boomer

1,87%

Lahir sebelum 1945,
usia sekarang 77+ tahun



Gen X

21,88%

Lahir 1965-1980,
usia sekarang
42-57 tahun



Post Gen Z

10,88%

lahir 2013 - sekarang,
usia sekarang s/d 9 tahun



Millennial

25,87%

Lahir 1981-1996,
usia sekarang 26-41



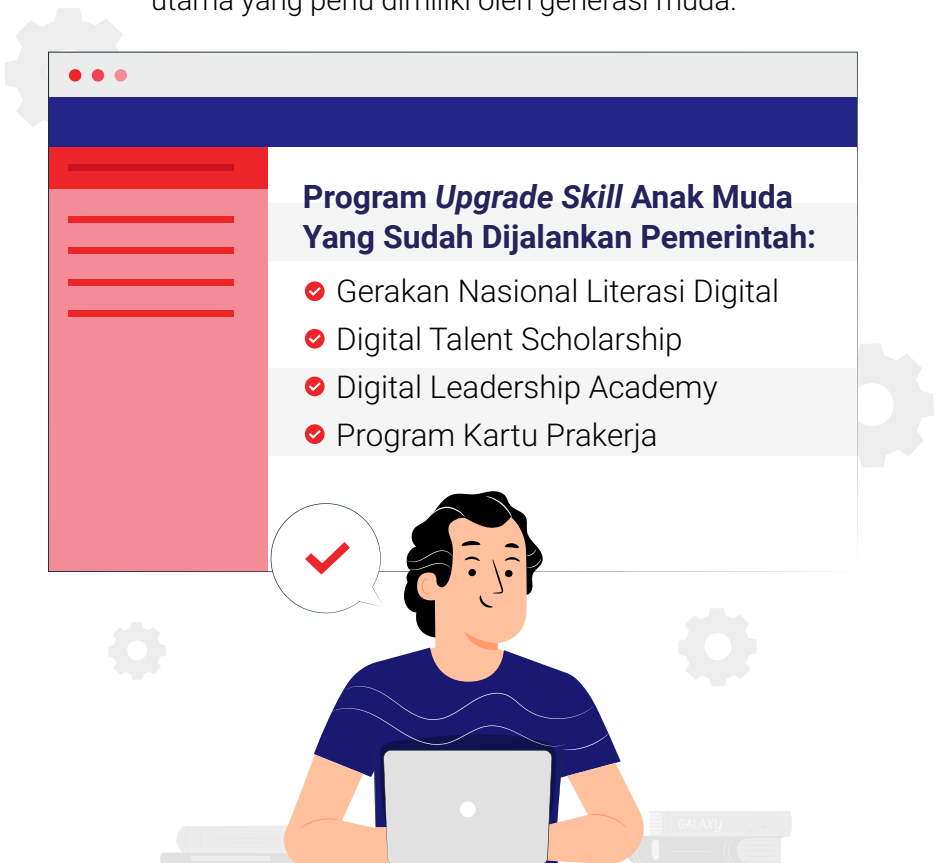
Gen Z

27,94%

Lahir 1997-2012,
usia sekarang 10-25

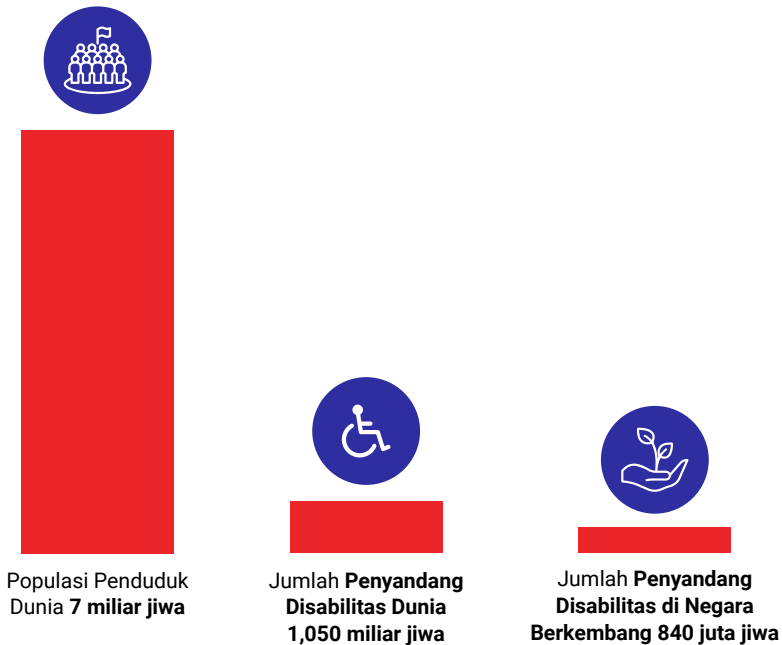
16. Apakah Presidensi Indonesia Membahas Isu Terkait Lapangan Kerja bagi Pemuda?

Forum G20 mempersiapkan kualitas SDM guna mendorong kewirausahaan di masa depan. Kemampuan adaptasi tinggi, kompetitif, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter sebagai prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda.



17. Apakah Presidensi Indonesia Membahas Isu Terkait Pemberdayaan Disabilitas?

Presidensi Indonesia dalam forum G20 menjadi momentum besar bagi Indonesia mendorong isu terciptanya kesetaraan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam multi sektor melalui perumusan komitmen rencana aksi yang konkret dan terukur.



18. Apakah Tantangan dan Hambatan yang Dialami Penyandang Disabilitas Selama Ini?

Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia pada 2020 lalu, penyandang disabilitas sudah menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan:

- Akses lapangan pekerjaan
- Akses informasi
- Akses kesehatan
- Akses transportasi
- Akses infrastruktur

Indonesia sebagai tuan rumah forum tingkat tinggi G20 memberi ruang pembahasan pada semua aspek tanpa terkecuali.

Salah satunya adalah isu disabilitas. Sebagai bentuk komitmen serius, Indonesia membuka layanan Contact Center khusus disabilitas di Presidensi G20.

Teman-teman penyandang disabilitas dapat mengakses layanan DITA (Disabilitas Tanah Air) di Nomor 143 yang dikelola Komisi Nasional Disabilitas.



19. Di Bidang SDM dan Ketenagakerjaan, Apa Saja Bahasan di Forum G20?



Forum G20 memiliki satu *working groups* yang khusus membahas ketenagakerjaan.

Working groups tersebut membahas mengenai sistem dan iklim kerja yang akan meningkatkan ekosistem yang dapat mendorong pertumbuhan kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Indonesia menggunakan G20 untuk menyampaikan keberhasilan reformasi struktural salah satunya melalui UU Cipta Kerja.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Mengenai Cipta Kerja (UU Ciptaker) Terdiri dari 11 Klaster untuk Menarik Kepercayaan Investor:



Penyederhanaan Perizinan



Persyaratan Investasi



Ketenagakerjaan



Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM



Kemudahan Berusaha



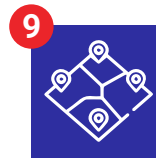
Dukungan Riset dan Inovasi



Administrasi Pemerintahan



Pengenaan Sanksi



Pengadaan Lahan



Investasi dan Proyek Pemerintah

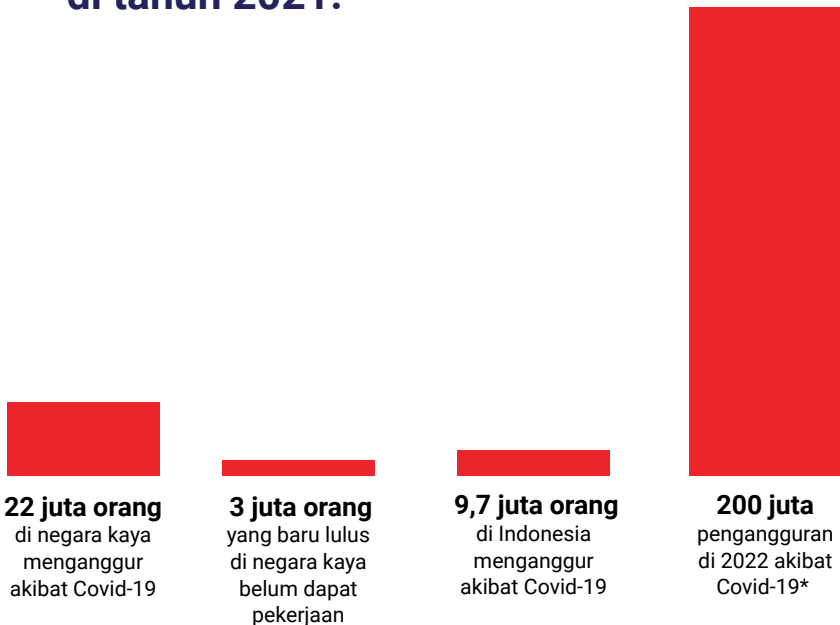


Kawasan Ekonomi

20. Adakah Pembahasan Terkait Perlindungan Tenaga Kerja di Forum G20?

Tentu. Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT. Beragam gagasan diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi Covid-19.

| Data hingga semester 1 di tahun 2021:



21. Apa Target yang Ingin Dicapai Terkait Pembahasan Isu Perlindungan Tenaga Kerja dalam Forum G20?

Ada dampak nyata bagi negara berkembang dan tertinggal dari pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia. Yakni membebaskan dunia dari kemiskinan dan pengangguran, serta mendukung perjuangan kaum rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

Angka kemiskinan global akibat pandemi Covid-19 meningkat hingga **100 juta orang**, yang merupakan peningkatan tertinggi sejak 20 tahun terakhir.



Mengapa Generasi Muda Perlu Mengikuti Forum G20?

Generasi muda perlu aktif mengikuti perjalanan Presidensi G20 Indonesia karena membahas isu-isu strategis yang nantinya akan diratifikasi dalam bentuk kebijakan di masing-masing negara anggota G20.

Sejumlah topik pembahasan yang dekat dengan generasi muda, seperti perubahan iklim, ketenagakerjaan, transformasi ekonomi digital, pemberdayaan perempuan, UMKM, pariwisata, termasuk kesehatan mendapatkan tempat pembahasan dalam wujud kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, pebisnis, hingga masyarakat.



22. Presidensi Indonesia di G20 Membahas PRR sebagai Sistem Kesehatan yang Tangguh. Apa itu PRR?

PPR adalah *pandemic prevention, preparedness and response*. Yakni arsitektur kesehatan global yang mencakup pembiayaan menghadapi pandemi di masa depan.

Berupa dana kesehatan global untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan.



Tiga fokus yang akan didorong Indonesia dalam memperkuat Arsitektur Kesehatan Global:

- ✓ Komitmen membangun ketahanan sistem kesehatan global yang membutuhkan mobilisasi sumber daya kesehatan dan keuangan yang esensial.
- ✓ Harmonisasi standar protokol kesehatan global.
- ✓ Memperluas pusat manufaktur global. Mencakup vaksin, terapi, diagnostik ke negara-negara berkembang, serta berbagi pengetahuan mengenai PPR.

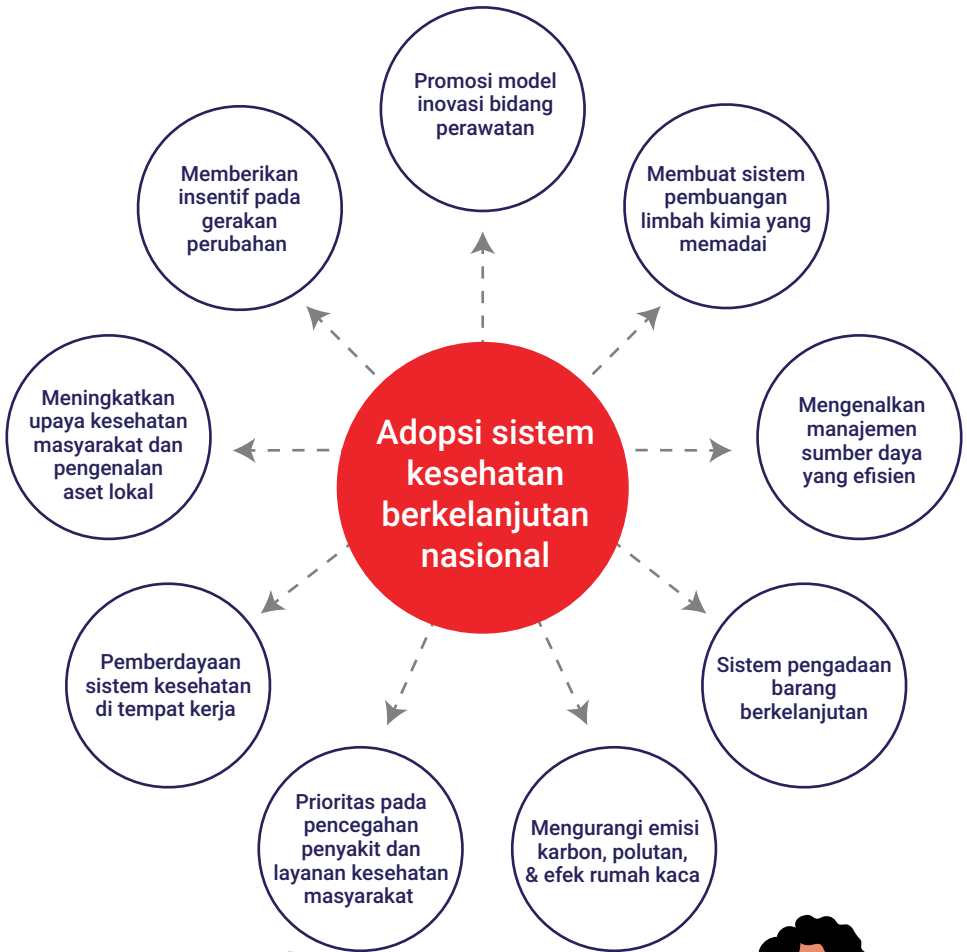
23. Mengapa Kesehatan Berkelanjutan (*Environment Suistanable Health System*/(ESHS) Menjadi Salah Satu Bahasan dalam Forum G20?

Menyelenggarakan sistem kesehatan yang berkelanjutan adalah salah satu komitmen dan tanggung jawab bersama sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sampai 2030.

Kesepakatan SDGs ditandatangani oleh 53 negara sejak 2013. Di samping itu, lingkungan berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui penyediaan sumber daya alam dan ekosistem yang mendorong pembangunan ekonomi dan pencapaian kekayaan.

Mengurangi kerusakan lingkungan sejalan dengan upaya pencapaian perbaikan dalam membangun kesejahteraan manusia dan lingkungan.





24. Apa Saja Isu Pokok Terkait Pemanfaatan Sains dan Teknologi Transdisipliner Untuk Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Pandemi yang Diusung Indonesia dalam Forum G20?

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai *Chair Engagement Group* (EG) mengampu *Science 20* (S20).

Pada S20 2022, Indonesia mengusulkan 5 isu pokok yang sejalan dengan 3 isu utama Presidensi G20 Indonesia. Lima isu pokok tersebut telah disampaikan Ketua AIPI, Prof. Satriyo S. Brodjonegoro



| 5 Isu Pokok Science 20

01

Membangun sistem kesehatan tangguh

02

Meningkatkan sistem kesehatan rendah karbon yang berkelanjutan

03

Meningkatkan kemampuan iptek secara multi, inter, dan trans-disiplin, untuk perubahan iklim dan kesiapsiagaan pandemi

04

Menjamin bahwa sumber daya insani ditempatkan menjadi pusat perhatian

05

Memperkuat keterkaitan antara fakta data – riset – kebijakan - praktik pelaksanaan menghadapi kesiapsiagaan perubahan iklim dan pandemik.



Presidensi G20 Indonesia untuk Kita Semua

Penerima manfaat dari Presidensi G20 Indonesia adalah masyarakat secara luas. Karena G20 merupakan forum 360 yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari dunia usaha, akademisi hingga pemerintah dari setiap negara anggota dan organisasi lokal maupun internasional yang membahas isu-isu terkait dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang.

Forum G20 menciptakan harapan bagi semua kalangan, termasuk generasi muda Indonesia yang kelak menjadi pemimpin di masa depan.



25. Mengapa Transisi Energi, Kesadaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Menjadi Isu Penting dalam G20?

Negara anggota G20 menyumbang 75% dari permintaan energi global sehingga harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam penyediaan energi bersih di masa depan.

Working groups khusus mengenai lingkungan dan perubahan iklim bertugas merumuskan percepatan transisi energi, ekonomi hijau, dan keberlanjutan lingkungan termasuk juga pemanfaatan sumber daya publik serta keuangan global yang sejalan dengan Perjanjian Paris.



Potensi Pemanfaatan Energi Hijau di Indonesia

Pemanfaatan EBT		
Energi	Potensi (MW)	Pemanfaatan (MW)
Surya	400.000	182,3
Hidro	90.000	6.286,7
Bioenergi	45.000	1.916,4
Bayu	60.000	154,3
Panas Bumi	23.700	2.175,7
Samudera	18.000	0
Nuklir	11.000	0
Total	648.300	10.697,4

Prinsip dan Strategi Pemerintah Menuju Net Zero Emission

Prinsip Net Zero Emission Kementerian ESDM

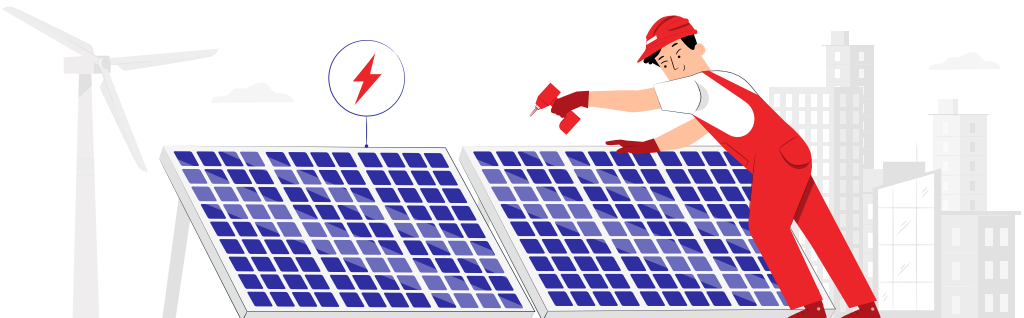
Pengurangan energi fosil dengan: *carbon tax & trading*, *co-firing PLTU* dengan EBT, serta *retirement PLTU*.

Peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri

Pemanfaatan *carbon capture & storage (CCS)*

Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan

Kendaraan listrik di sektor transportasi



26. Apa Saja Peran G20 dalam Mengatasi Ketahanan Pangan Global?

Kelompok Kerja Pertanian Presidensi G20 menyusun *issue note* dengan tema *Balancing Production and Treat to Fulfill Food for All*. Tema tersebut memastikan jaminan pasokan pangan nasional dari sumber pertanian dalam negeri, jaminan kelancaran perdagangan pangan, dan pertanian lintas batas negara untuk mencukupi kecukupan pangan bagi semua negara.

Kolaborasi global di G20 juga diharapkan dapat meningkatkan mata pencaharian petani kecil, promosi pertanian dan agripreneur inovatif melalui pertanian digital.



Kontribusi Sektor Pertanian terhadap GDP Indonesia 2020 (dalam %)



27. Bentuk Nyata Presidensi G-20 Indonesia dalam Dukungan Pemulihan Ekonomi Global?

Presidensi G20 Indonesia diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi global inklusif yang mengedepankan prinsip kerja sama baik skema antarnegara maupun swasta dengan negara, serta inovasi kebijakan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional.



6 Topik Prioritas Bahasan untuk Mendorong Investasi Berkelanjutan

- 1 Reformasi WTO
- 2 Peran sistem perdagangan multilateral untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3 Respon perdagangan, investasi, dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global.
- 4 Perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan.
- 5 Mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global.
- 6 Industrialisasi Inklusif dan berkelanjutan.

Apakah Teknologi & Digitalisasi akan Menggantikan Peran Manusia sehingga Dapat Terjadi PHK Massal?

Digitalisasi tidak akan bisa menggantikan peran manusia 100%. Manusia memiliki keterampilan yang tidak akan tergantikan mesin dan robot seperti empati, kreativitas, dan analisa kompleks.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebutkan transformasi digital membuka setidaknya 2,5 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 dan sumbangan 1% terhadap PDB Indonesia. Di jangka panjang, Indonesia bahkan membutuhkan sembilan juta SDM digital.



28. Apa Saja Tanggung Jawab Indonesia sebagai Pengampu *Digital Economy Working Group (DEWG)* dalam Presidensi G20?

DEWG adalah sebuah forum yang membahas isu digital ekonomi dengan pembahasan strategis, dinamis dan komprehensif mengenai isu digital lintas sektoral.

Dari segi bisnis, Indonesia juga mendorong agar negara-negara G20 mewujudkan *fair level of playing field* sebagai sebuah tujuan bersama.

Tiga prioritas yang dibahas negara G20 dalam DEWG adalah:



PostCovid-19 Recovery and Connectivity

(Konektivitas dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19)



Digital Skills and Digital Literacy

(Kemampuan Digital dan Literasi Digital)



Cross-Border Data Flow and Data Free

Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara)



Prinsip Indonesia dalam Pembahasan Arus Data Lintas Negara G20:

Lawfulness

Proses pertukaran data harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

Fairness

Pertukaran data harus memiliki tujuan jelas

Transparency

Pentingnya komunikasi dan informasi mengenai pemrosesan data yang terbuka dan mudah dipahami

Reciprocity

Timbal balik

29. Mengapa G20 Memandang Literasi dan Kecakapan Digital sebagai Poin Penting dalam Pemulihan Pascapandemi Covid-19?



Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba selaku *Chair Digital Economic Working Group (DEWG)* menyatakan pemilihan topik literasi dan kecakapan digital merupakan konsekuensi dari pembangunan infrastruktur digital yang sudah tersedia.

Pemerintah merasa harus membahas isu ini secara mendalam di forum G20 untuk mendapatkan *insight* terkait pemanfaatan akses digital secara positif dan mendukung produktivitas.

I Tren Digitalisasi UMKM

Berdasarkan catatan Kominfo sepanjang pandemi 16,4 juta UMKM telah terdigitalisasi. Jumlah ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Data Bank Dunia tunjukkan sekitar 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik.

Data Kemenkop-UKM sebut hampir 50% usaha online memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok untuk memasarkan produknya. Kemudian, baru 15% usaha yang memanfaatkan *platform marketplace e-commerce*.



30. Apakah Forum G20 Membahas Persoalan Arus Data Lintas Batas Negara?

Untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan regulasi berbeda di tiap negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama.

Alasannya, setiap negara memiliki perspektif yang berbeda dalam mengelola arus data yang semakin deras akibat penggunaan ruang digital selama pandemi, terkait transaksi online, data kesehatan, hingga penyebaran data melalui media sosial.

Teknologi digital secara natural bersifat *borderless* sehingga arus data bisa mengalir ke seluruh negara. Meski demikian, pengaturannya diharapkan dapat dilakukan seragam.



31. Apakah Forum G20 Membahas Uang Digital sebagai Alat Bertransaksi di Masa Depan?

Presidensi G20 Indonesia memberikan ruang pembahasan bagi rencana penerbitan mata uang digital atau disebut *Central Bank Digital Currency (CBDC)*. Penerbitan CBDC untuk merespons maraknya kehadiran uang *crypto*. Meski sama-sama berbasis *blockchain*, CBDC diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan uang kartal.

Bank Indonesia akan mendorong pembicaraan *general principal* CBDC Rupiah Digital dalam kerangka pembahasan *cross-border payment system*. Mata uang digital diharapkan bisa menciptakan efisiensi ekonomi dan mendukung inklusi keuangan.



Peran Penting Perempuan

Dunia memperingati Hari Perempuan Internasional setiap tanggal 8 Maret. Bagi Indonesia, peringatan ini merupakan sarana pengingat peran perempuan yang berdampak besar dalam proses pemulihan dari pandemi dan krisis ekonomi, di mana 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia bergantung pada peran perempuan.

Sebagai wujud kehadiran negara bagi seluruh rakyatnya, termasuk perempuan, Presidensi G20 Indonesia mengusung penciptaan ruang yang setara, inklusif, adil dan berkelanjutan bagi perempuan baik dalam urusan rumah tangga, ekonomi, hingga perlindungan bagi pekerja migran perempuan.

Sejumlah program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan telah bergulir, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga pelatihan wirausaha bagi perempuan.

32. Apa Saja Tugas dan Bahasan Mengenai Perempuan dalam Kelompok Kerja W20?

W20 adalah *engagement group* yang mewakili suara perempuan dalam hal kesetaraan gender di ruang publik, kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pertahanan terhadap perempuan disabilitas dan perempuan pedesaan.

Di bawah koordinasi W20, Indonesia membawa isu penting mengenai peran perempuan khususnya di masa krisis pandemi, ekonomi, dan perubahan iklim. Perempuan memiliki resiliensi tinggi untuk pulih dari pandemi.



Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan:

- ✓ Bantuan permodalan melalui PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)
- ✓ Pelatihan pemasaran digital bagi wirausaha perempuan
- ✓ Pelatihan kewirausahaan perempuan
- ✓ Program Keluarga Harapan (PKH)
- ✓ BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita)
- ✓ Program Sembako



33. Apa Saja Langkah Pemerintah dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang Sebagian Besar Adalah Perempuan?

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.



SE.03/MEN/IV/2011

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) juga menerbitkan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri PPPA No.5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender, peduli anak di tempat kerja, dan Peraturan Menteri PPPA No.1 tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan (RP3) di tempat kerja.

Perlindungan pekerja migran Indonesia juga termasuk penghentian perdagangan orang, perlindungan PMI menyeluruh mulai sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air, optimalisasi peran TNI-Polri, penerapan protokol kesehatan, dan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan.



Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Bulan Januari 2022

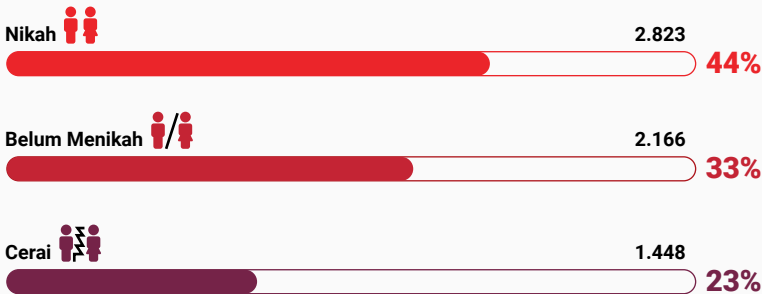
Berdasarkan Jenis Kelamin



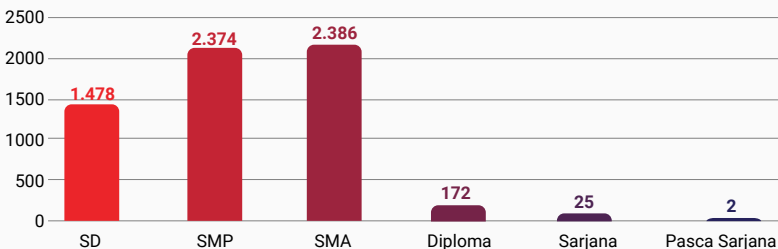
Berdasarkan Sektor



Berdasarkan Status Pernikahan



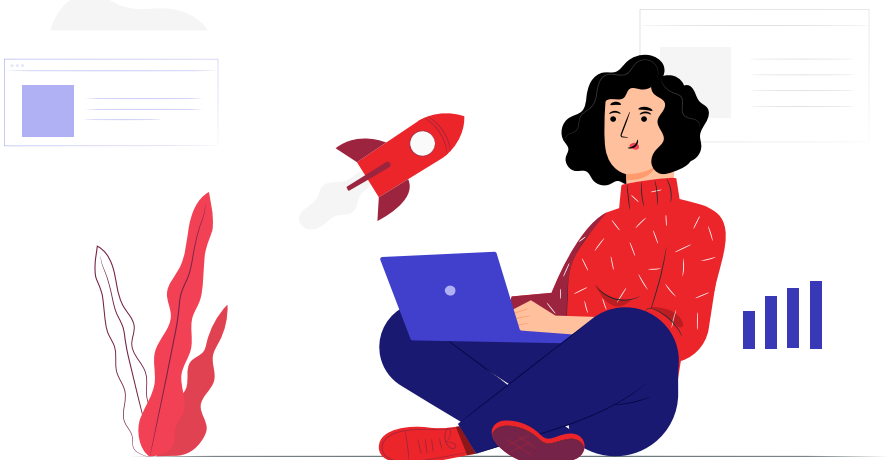
Berdasarkan Pendidikan



34. Apa Saja Bahasan Mengenai Perempuan dan Kesetaraan *Gender* dalam Presidensi G20 Indonesia?

Saat berdiri tahun 2015, W20 mendorong komitmen negara G20 untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25% di tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan melalui pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan melalui UMKM untuk pembangunan berkelanjutan, dengan teknologi sebagai *enabler*.

Chair Woman20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi menyebut upaya peningkatan kualitas UMKM yang dimiliki perempuan dapat menjadi salah satu cara menghapus diskriminasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya memaksimalkan pemanfaatan *platform* digital dalam membangun ekosistem UMKM milik perempuan yang kuat.



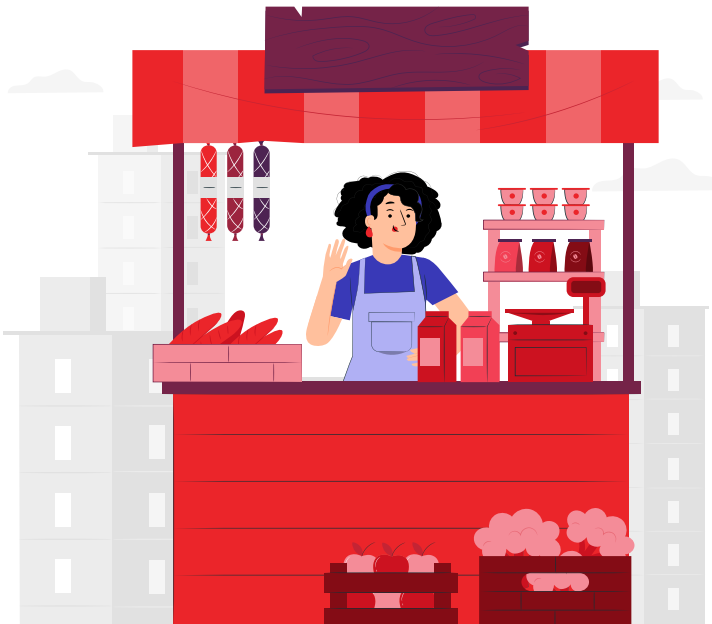
UMKM Perempuan Indonesia dalam Angka

41,6 jt Jumlah UMKM perempuan Indonesia

2,4 jt Pengusaha perempuan penerima KUR dengan total bantuan US\$ 17,8 miliar

63,5% Penerima Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) khusus pengusaha perempuan mikro dan ultra mikro dengan dana US\$ 1,1 miliar

4,53 jt UMKM milik perempuan masuk ke ekosistem digital selama pandemi

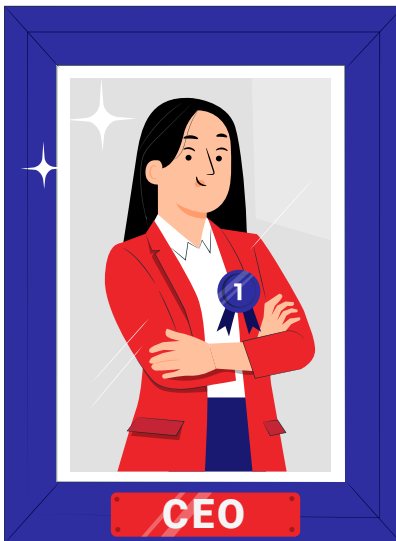


35. Apakah yang Dimaksud dengan *Glass Ceiling*?

Glass ceiling adalah konsep yang berkembang tahun 1980-an yang menggambarkan halangan tidak kasat mata yang menghambat wanita untuk menempati posisi teratas di hierarki perusahaan.

Posisi tertinggi di perusahaan dinilai hanya pantas untuk kaum pria karena dari sisi sifat, bakat, dan tingkah laku lebih pantas untuk memimpin sebuah perusahaan.

Efek *glass ceiling* bagi wanita terlihat dari kesenjangan upah, pemisahan jenis pekerjaan, dan penghalang proses promosi.

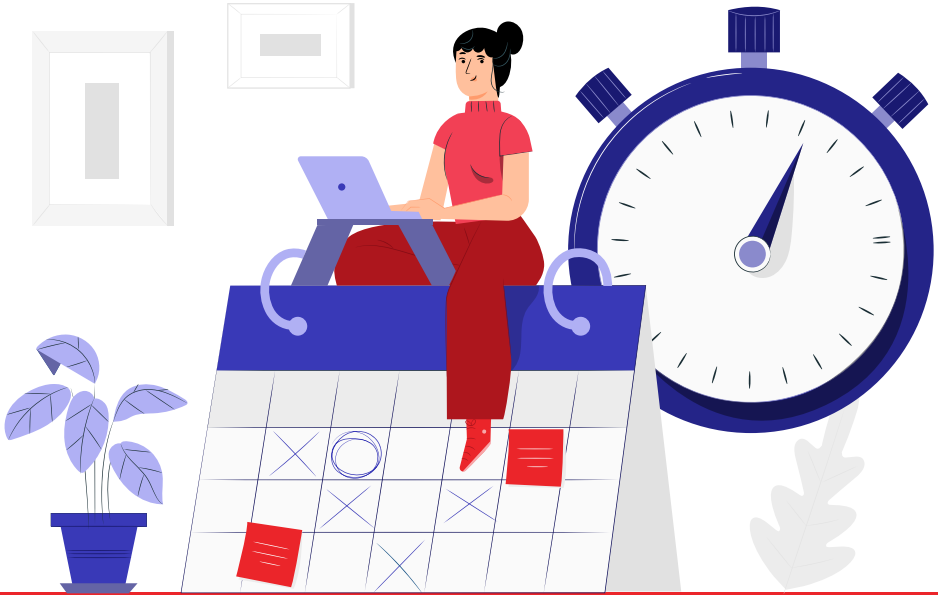


Persentase Jumlah CEO Perempuan Indonesia Berdasarkan Skala Perusahaan

23,5% Perusahaan kecil

17,4% Perusahaan menengah

12,9% Perusahaan besar



| Manfaat Memiliki Pemimpin Perempuan di Organisasi

- ✓ Membantu organisasi mencapai hasil yang lebih baik
- ✓ Lebih memahami kebutuhan dan solusi bagi konsumen
- ✓ Sistem & cara kerja yang lebih inklusif dan ramah gender
- ✓ Pemberdayaan SDM (*empowering people*)
- ✓ Detail dan efisien

Apa Saja Manfaat Indonesia

sebagai Tuan Rumah Penyelenggara

G20?

Tidak hanya di Jakarta, G20 juga diselenggarakan di 25 kota di seluruh Indonesia seperti Yogyakarta, Solo, Malang, Palembang, Bali, Lombok, dan lainnya. Hingga November 2022, akan ada 184 pertemuan yang terdiri dari satu konferensi tingkat tinggi, 20 pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, 17 pertemuan tingkat *sherpa*/deputi, 56 pertemuan tingkat kelompok kerja dan 90 pertemuan tingkat *engagement group*.



Pemerintah Indonesia menargetkan penyelenggaraan G20 akan berdampak baik di bidang ekonomi, pembukaan lapangan kerja, promosi pariwisata Indonesia, dan peran strategis Indonesia dalam desain kebijakan pemulihan ekonomi dunia.

| Manfaat Penyelenggaraan G20 bagi Indonesia

Ekonomi Peningkatan **konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun dan kontribusi Rp7,4 triliun** pada PDB Indonesia.

Lapangan Kerja Pelibatan **UMKM yang menyerap 33.000 tenaga kerja, dan 700 ribu lapangan kerja baru.**

Promosi Indonesia Peningkatan **wisatawan mancanegara 1,8 juta-3,6 juta.**

Peran Strategis Indonesia dalam **mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia** yang berdampak bagi ekonomi Indonesia.

36. Apa Saja Manfaat Presidensi G20 Indonesia di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Tourism Working Group (TWG) G20 yang dipimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) mendorong ketahanan pariwisata sebagai upaya pemulihan global pascapandemi Covid-19.

TWG G20 mengidentifikasi isu utama pembahasan yaitu sebagai agen perubahan transformasi wisata yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan *community based tourism* seperti desa wisata, desa kreatif, dan program yang berkeadilan.

Kemenparekraf menyebut peran penting Indonesia dalam menjadi pelopor konsensus negara G20 yang merujuk pada tiga pilar penting arahan presiden:



**Kesehatan
inklusif**



**Transformasi
digital**



**Transisi
energi**

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Pascapandemi

Paradigma

Quality and Sustainable Tourism

Prinsip:

- Personal (*more personalized*)
- Sesuai kebutuhan (*customized*)
- Kedaerahan (*localized*)
- Ukuran lebih kecil (*smaller in size*)



Target 2022

- Menyumbang 4,3% GDP Indonesia
- Memberikan nilai tambah sampai Rp 1.236 triliun
- Nilai ekspor produk kreatif US\$ 21,28 miliar
- 400 ribu lapangan kerja baru

Lima aksi yang dilakukan Kemenparekraf:

- Pengembangan SDM
- Inovasi melalui digitalisasi
- Pemberdayaan perempuan dan generasi muda
- Rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan
- Investasi di sektor pariwisata dan digital.

37. Seberapa Signifikan Subsektor Ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional?

Menurut data dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional: 2017 Rp1.000 triliun, 2018 Rp1.105 triliun, 2020 Rp1.211 triliun.

Indonesia menduduki posisi ketiga terbesar di dunia, dengan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB. Dua posisi sebelumnya ditempati Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Namun, dari segi serapan tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif Indonesia justru lebih unggul dari Amerika Serikat. Pada 2019 sektor ekonomi kreatif Indonesia mampu menyerap hingga 17 juta tenaga kerja. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 4,7 juta pekerja pada sektor ekonomi kreatif.

Ekonomi Kreatif di Indonesia

kontribusi subsektor ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional:

Rp 1.000
Triliun
2017

Rp 1.105
Triliun
2018

Rp 1.211
Triliun
2020

38. Sejauh Mana Indonesia Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan?

Dalam upaya mengembangkan *sustainable tourism*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki empat pilar fokus yang dikembangkan.

- **Pengelolaan berkelanjutan** (bisnis pariwisata)
- **Ekonomi berkelanjutan** (sosio ekonomi)
- **Aspek lingkungan** (*environment sustainability*)
- **Keberlanjutan budaya** (*sustainable culture*)

Berbekal 4 pilar utama tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang banyak diminati wisatawan.



Destinasi wisata berbasis *sustainable tourism* di Indonesia



Taman Nasional Baluran, Jawa Timur



Taman Nasional Ujung Kulon, Banten



Sangah Monkey Forest, Bali



Pundi Kayu, Palembang



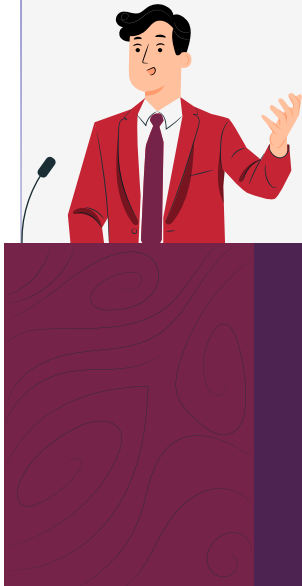
Umbul Pongok, Jawa Tengah

Peran Pemerintah dalam Mengajak Generasi Milenial Peduli pada Perubahan Iklim

Sebagai ujung tombak perubahan iklim, pemerintah membuat berbagai program yang melibatkan generasi muda. Kementerian ESDM menggelar program GERILYA (Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya) agar mahasiswa ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menuju *net zero emission*.

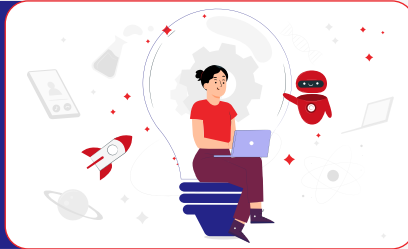
GERILYA telah melahirkan 52 aktivis energi (gelombang pertama) dan siap mendidik 57 mahasiswa di gelombang kedua. GERILYA mengajak mahasiswa untuk belajar tentang PLTS dari segi desain, instalasi, hingga pemasaran dalam kursus selama dua bulan.

Setelah itu, mereka akan disebar ke beberapa perusahaan mitra untuk turun langsung dalam *team based project* selama empat bulan. GERILYA adalah program bersama antara Kementerian ESDM & Kemendikbudrisitek & melibatkan swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, NGO, dan *stakeholder* energi.



Program pemerintah dalam *Energy Transitions Youth Forum* di G20

*Energy Transitions
Innovation Challenge*



Inovasi Surya Power
Solusi untuk Negeri
(SUPER SUN)



*Go-Gerilya feat Desa
Energi Berdikari
Pertamina*

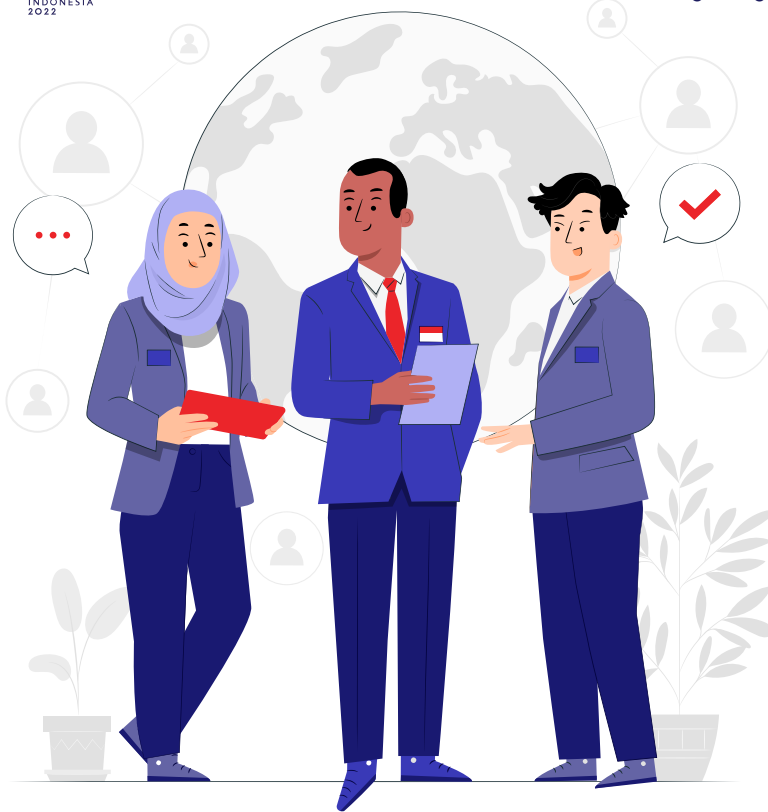


39. Berapa Alokasi Anggaran Indonesia untuk Menghadapi Perubahan Iklim?

Sebelumnya, negara-negara maju berkomitmen memberikan pendanaan iklim US\$100 miliar per 2020 untuk diberikan kepada negara miskin dan berkembang. Baru pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021 negara-negara maju berhasil bersepakat kembali.

Indonesia sudah berusaha mendanai perubahan iklim. Lobi Indonesia di G20 diharapkan bisa mendorong negara maju menyediakan US\$100 miliar untuk penanganan perubahan iklim.





Pendanaan penanganan perubahan iklim di Indonesia

Tahun	Alokasi	Realisasi
2018	132,47	126,04
2019	97,66	83,54
2020	77,81	Tidak ada data

Nilai (Triliun Rupiah)

40. Apakah Indonesia Diuntungkan dari Perdagangan Karbon Global?

Tentu saja. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki potensi menyerap emisi karbon sekitar 113,18 gigaton.

Jika saat ini, kredit karbon dijual seharga US\$ 5 per ton, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai US\$ 565,9 miliar atau setara Rp 8.000 triliun.

Potensi ini ditopang oleh berlimpahnya sumber daya alam, seperti hutan hujan, hutan mangrove dan hutan gambut yang mampu menyerap miliaran ton emisi karbon.



Benefit Perdagangan Karbon



| Potensi Perdagangan Karbon di Indonesia



Hutan hujan tropis

Luas area 125,9 juta hektar

Kemampuan serap emisi
CO2 25,18 miliar ton



Hutan Mangrove

Luas area 3,31 juta hektar

Kemampuan serap emisi
CO2 33 miliar ton



Hutan Gambut

Luas area 7,5 juta hektar

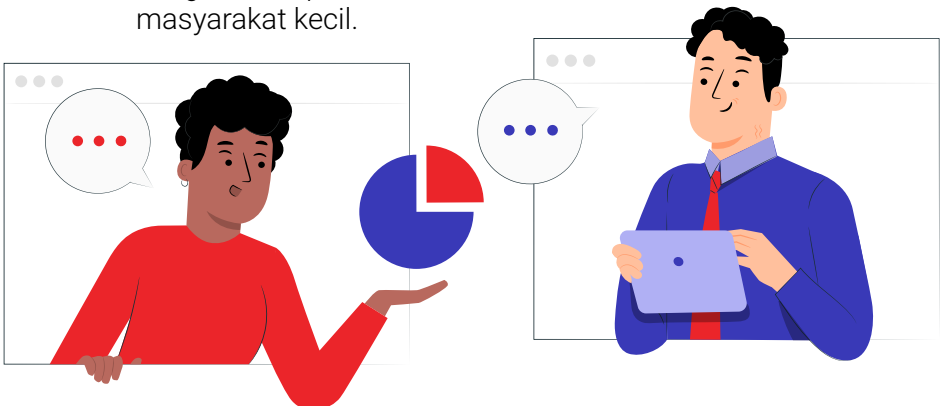
Kemampuan serap emisi
CO2 55 miliar ton

41. Apa Saja Komitmen Negara Anggota G20 dalam Perubahan Iklim?

Perubahan iklim (*climate change*) dibicarakan dalam *finance track* yaitu mengenai *sustainable finance* dan *climate change finance*. Pemimpin G20 memiliki komitmen untuk menurunkan suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat *celcius* dan penurunan gas rumah kaca sebesar 314-398 juta ton CO₂ pada tahun 2030.

Agar mencapai komitmen tersebut, sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi sektor yang menyebabkan penurunan CO₂ secara lebih murah dan cepat. Indonesia menjadi perhatian dunia dalam melakukan transisi energi bersih.

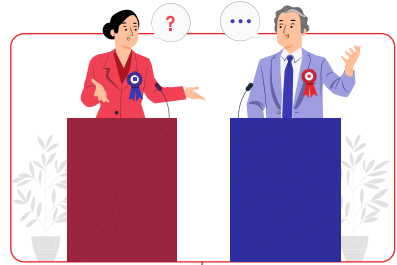
Komitmen menanggulangi perubahan iklim dilakukan melalui langkah-langkah progresif yang mengedepankan prinsip ekonomi berkelanjutan, prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*) dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil.



I NDC (Komitmen Iklim Indonesia)

Perjanjian Paris

Komitmen bersama hampir seluruh negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi), mengatasi dampak perubahan iklim (adaptasi) dan menyediakan pendanaan untuk keduanya.



Diratifikasi Pemerintah Indonesia dalam UU No 16 Tahun 2016

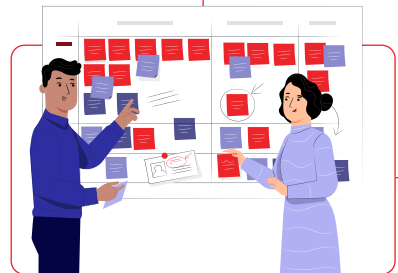
Komitmen iklim Indonesia dinyatakan dalam dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara National (*Nationally Determined Contribution/NDC*).



Sektor Utama Pengurangan Emisi

- **Kehutanan**
- **Energi**
- Pertanian
- Proses Industri (IPPU)
- Pengolahan Limbah

Penyumbang Utama Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia



I NDC (Komitmen Iklim Indonesia)

Target Pengurangan Emisi Indonesia

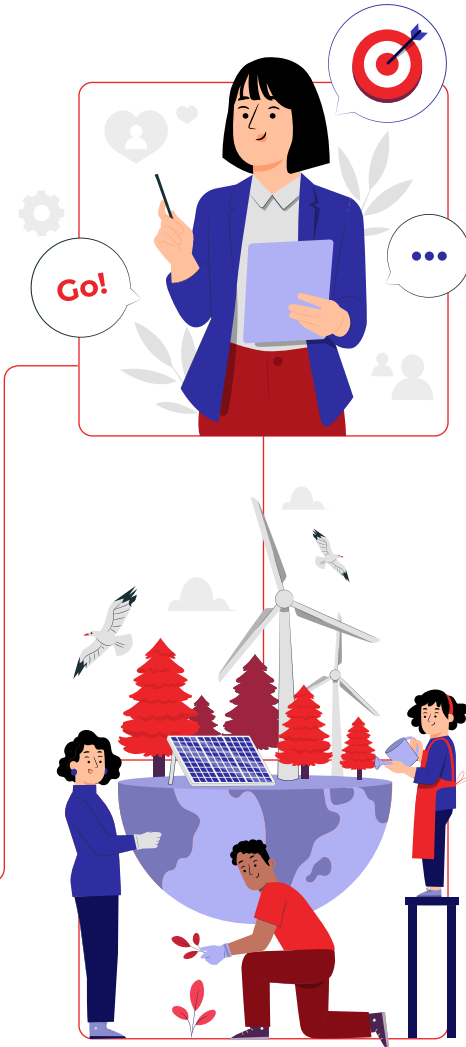
- 29% dari kondisi *Business as Usual (BAU)* tahun 2030 dengan upaya sendiri
- 41% jika ada dukungan internasional (pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas).

Ambisi Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia

Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

**(First NDC Indonesia, 2016)*

- Ketahanan ekonomi
- Ketahanan sosial dan mata pencaharian (*livelihood*)
- Ketahanan ekosistem dan lanskap

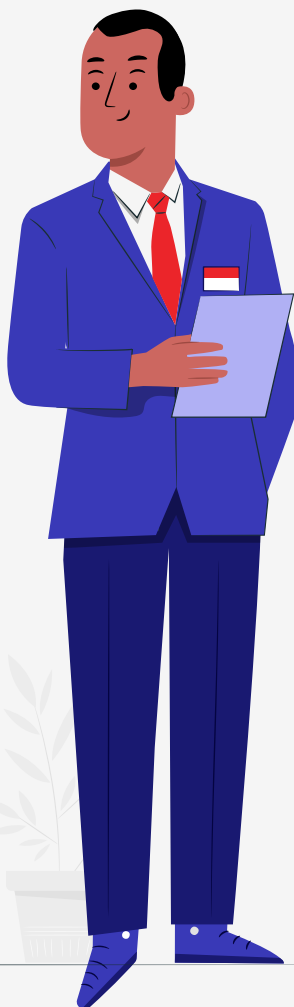


Apa Saja Tiga Tantangan Besar dalam Melakukan Transisi Energi yang Disampaikan Presiden Joko Widodo?

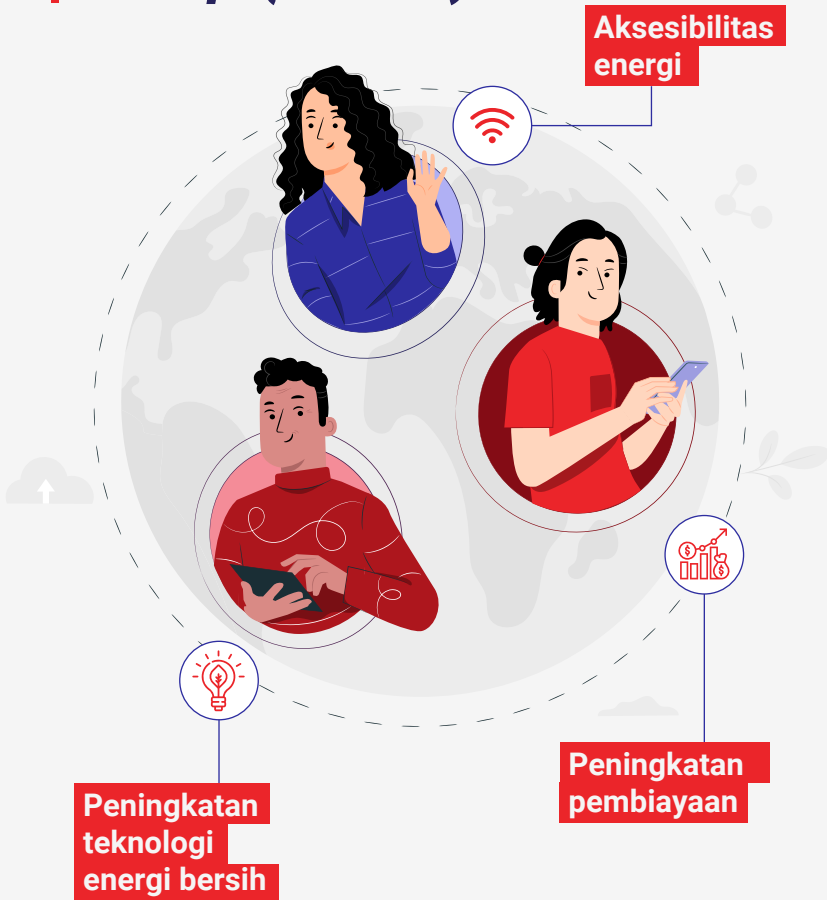
Presiden Joko Widodo menyebut **tantangan besar pertama adalah akses energi bersih**. Tidak seluruh warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern

Tantangan kedua adalah pendanaan. Negara perlu mencari dan mengeksplorasi mekanisme baru yang keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat.

Tantangan ketiga adalah dukungan riset dan teknologi untuk menghasilkan teknologi yang efisien, kompetitif dan memiliki nilai tambah.



Tiga Pilar *Energy Transitions Working Group (ETWG)*

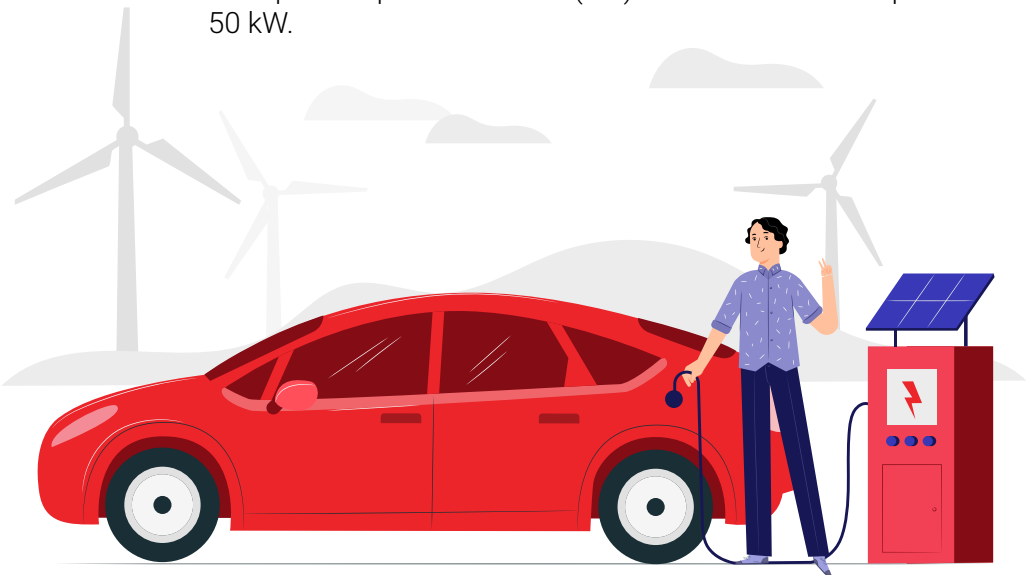


42. Bagaimana Rencana Penggunaan Mobil Listrik pada Penyelenggaraan G20?

Pada KTT G20 di Bali, direncanakan ada 500 mobil listrik yang akan digunakan. Rencana penggunaan mobil listrik tersebut merupakan kolaborasi berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), Grab Indonesia, *Intelligent Transport System (ITS)* Indonesia, dan *World Resources Institute (WRI)*.

Tidak hanya mobil listrik, panitia KTTG20 juga menyiapkan ekosistem pendukung mobil listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Di Bali, akan ada 21 unit SPKLU *fast charging* di 15 *shelter*. PT PLN (Persero) menyiapkan 12 unit SPKLU yang merupakan tipe 25 kilo Watt (kW) dan sembilan unit tipe 50 kW.





Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

Tiga aspek penting dalam aturan ini mencakup:



Lingkungan
dan konservasi



Efisiensi dan
ketahanan energi

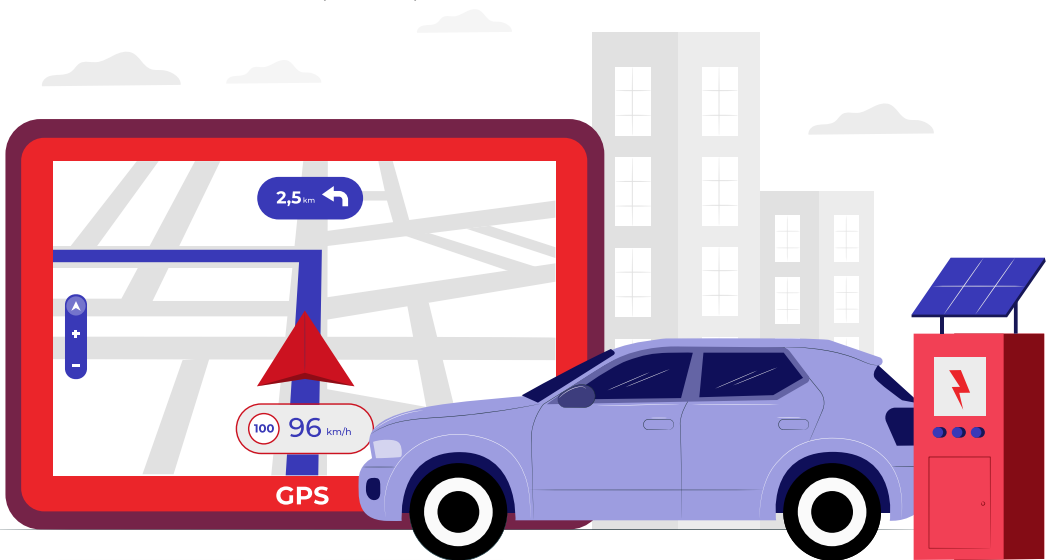


Peningkatan
kapasitas industri
dan kemampuan
daya saing

43. Apakah Upaya Pemerintah dalam Mempercepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik?

Selain mobil listrik, Indonesia berencana mengembangkan ekosistem kendaraan listrik seperti baterai kendaraan listrik. Indonesia bahkan berencana menjadi pusat baterai dunia karena memiliki bahan baku yang melimpah; nikel, kobalt, mangan, dan feronikel untuk pembuatan baterai lithium.

Sejumlah daerah penghasil bahan baku tersebut berada di Halmahera, Morowali (Sulawesi Tengah), Bangka Belitung, dan Pegunungan Tiga Puluh (Aceh). Pemerintah juga terus mendukung PT PLN (persero) untuk investasi dan pengembangan Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)



Jumlah SPKLU di Indonesia (September 2021) **187 unit**

Sebaran SPKLU



Jawa Timur, Bali & NTB
29

Jakarta
83

Jawa Barat
29

DIY Yogyakarta
29

Sulawesi
6

Sumatera
7

44. Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Energi Bersih, Khususnya pada Generasi Muda??

Dirjen EBTKE ESDM menggelar sebuah acara [RE] Spark Indonesia 2022" *Acceleration Transition, Igniting Innovation* yang didesain *New Energy Nexus* Indonesia untuk mendukung tumbuh kembang ekosistem yang kondusif untuk pengembangan ide bisnis dan inovasi di bidang energi bersih.

Program tersebut mencakup inkubasi, akselerasi, dan pendanaan kepada inovator, *startup* dan *entrepreneur* di bidang energi bersih di Indonesia. Rangkaian acara [RE]Spark 2022 ini terdiri dari *hackathon*, *investment speed dating*, *exhibition*, dan *workshop*.





Startup bidang energi yang memiliki potensi besar di masa depan:



Biogas



PLTS



Smart Grid



Kendaraan Listrik

Target Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK Menuju Indonesia Maju 2045

Pemerintah memiliki lima strategi pembangunan pendidikan menuju Indonesia Maju 2045. Lima strategi tersebut dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan, peran masyarakat dalam pembangunan, profesionalisme dan metode pembelajaran, perubahan budaya sekolah dan membaca, serta pendidikan vokasi, *entrepreneurship* dan karakter.

Pemerintah juga menambahkan pembangunan pendidikan melalui kebudayaan sebagai nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja. Tujuannya, Indonesia ingin menjadi salah satu pusat budaya dan peradaban dunia tanpa pernah kehilangan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.





Target Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia 2045

	2015	2025	2035	2045
Rata2 lama sekolah (tahun)	8,3	9.5	10,7	12
APK* Perguruan Tinggi (%)	29,9	35	50	60
Angkatan kerja lulusan SMA Sederajat dan PT (%)	39,3	50	70	90

APK: Angka Partisipasi Kasar

45. Apa Saja Agenda Prioritas Pemerintah di Sektor Pendidikan dalam Presidensi G20?

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Kemendikbudristek), Iwan Syahril, selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 (*Chair Education Working Group*) menegaskan, negara-negara G20 perlu bahu-membahu membantu dunia mengatasi ketimpangan akses pendidikan berkualitas dalam pemulihan pascapandemi Covid-19.

Ada empat agenda prioritas pendidikan yang akan diangkat Indonesia dalam Kelompok Kerja Pendidikan G20 atau *G20 Education Working Group (EdWG)*. Salah satu agenda tersebut berkaitan erat dengan budaya gotong royong bangsa Indonesia, yaitu Solidaritas dan Kemitraan atau "*Solidarity and Partnership*".



4 Agenda Prioritas Pendidikan

Solidarity and Partnership:

Menawarkan kearifan budaya gotong-royong dan kerja sama dalam mengatasi permasalahan pendidikan global.



Universal Quality Education:

Mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan.



Digital Technologies in Education:

Memperdalam pembahasan mengenai permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan.



The Future of Work Post

Covid-19: Penyesuaian dan solusi dalam pendidikan untuk menjawab tantangan di masa depan.



46. Kenapa Gotong Royong Dipilih untuk Diadopsi Negara G20 dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan Berkualitas?

Budaya bangsa Indonesia yang telah terbiasa bergotong royong mengatasi kesulitan secara bersama-sama dapat menjadi inspirasi dunia untuk pemulihan pendidikan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyatakan nilai gotong royong atau saling membantu dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia, yakni *'Recover Together, Recover Stronger.'*





| Dampak Pandemi Sektor Pendidikan

Dampak paling berat dari pandemi dalam hal pendidikan adalah *learning loss*. Untuk ini, menurut Iwan Syahril, selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 berupaya menghasilkan sebuah laporan berupa contoh *best practice* pendidikan dari berbagai negara di G20, seperti di Afrika, Eropa, Asia, Amerika dan Australia.

Sehingga, laporan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi dunia tentang bagaimana cara mengatasi ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas dalam pemulihan pascapandemi Covid-19.

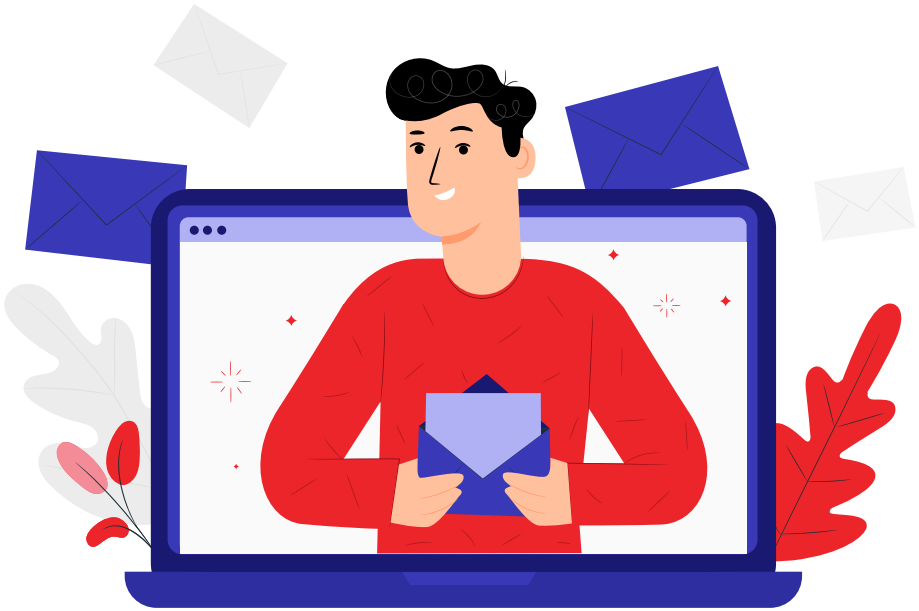
47. Bagaimana Upaya Pemerintah Melakukan Pemerataan Teknologi Digital dalam Bidang Pendidikan?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi program pengembangan laptop produksi dalam negeri, Laptop Merah Putih.

Kemendikbudristek ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sekaligus memberdayakan sumber daya manusia dalam negeri, dengan melibatkan perwakilan dari ITB, UGM, dan ITS.

Dalam memproduksi Laptop Merah Putih bersertifikat TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) ini, pemerintah menganggarkan dana Rp 3,7 triliun untuk pengadaan 431.730 unit laptop pada 2021. Ditargetkan, Laptop Merah Putih bakal memiliki kandungan lokal antara 40%-50% pada 2024 mendatang.

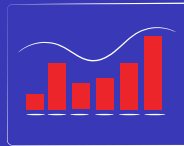




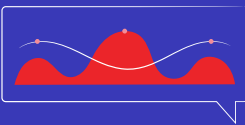
Laptop Merah Putih

Anggaran **Rp. 3,7 Triliun***

Pengadaan **431.730 Unit***



*TA 2021



Konsorsium Perencanaan **ITB, UGM, ITS**

Target 2024

TKDN 40%-50%

Negara Manakah yang Kerap Menjadi Rujukan Pendidikan karena Mengadopsi Sistem Terbaik di Dunia?

Menurut data *Organisation for Economic Co-ordination and Development (OECD)*, tiga negara yang memiliki peringkat terbaik dalam hal pendidikan di tahun 2021 adalah Jepang, Estonia, dan Korea Selatan. Jepang adalah negara maju dalam *science*, teknologi, dan rancang-bangun yang memiliki beberapa bentuk perguruan tinggi sehingga 50% warganya melanjutkan ke universitas.

Negara Baltik Estonia memiliki peringkat ketiga tertinggi di bidang membaca, kedua di bidang sains dan tiga di bidang matematika. Negara Ginseng Korea Selatan menjadi rujukan karena memiliki populasi masyarakat terdidik paling banyak di dunia. Sekitar 91% masyarakat Korsel menyelesaikan pendidikan menengah dan 70% kaum mudanya memiliki kualifikasi tersier.



10 Negara Terbaik Dunia Bidang Pendidikan Tahun 2021



Jepang



Estonia



Irlandia



Kanada



Polandia



Finlandia



Jerman



New Zealand



Korea Selatan



Amerika Serikat

Aktris Maudy Ayunda ditunjuk menjadi Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia.

Sosoknya diperkenalkan kepada publik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, pada konferensi pers akhir Maret lalu.

Maudy Ayunda memiliki latar belakang pendidikan program sarjana *Philosophy, Politic, and Economics* dari University of Oxford, Inggris dan juga merupakan lulusan *Master of Bussiness Administration and Master of Arts in Education* di Stanford University, AS.

Alasan Maudy Ayunda terpilih, **pertama, karena menguasai sejumlah bahasa asing. Kedua, ia merupakan sosok publik figur dari kalangan muda atau milenial.** Sehingga diharapkan dapat menjangkau kalangan masyarakat luas, terutama generasi milenial dan generasi Z.





Tugas Utama Maudy Ayunda Sebagai Jubir untuk Presidensi G20 Indonesia:

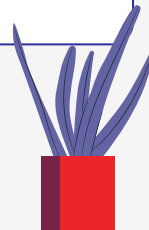
- 1 Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20.
- 2 Menyiapkan perkembangan pertemuan *working group*, *engagement group*, maupun *side event* pada Presidensi G20 secara rutin. Sehingga, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda Presidensi G20 Indonesia.

Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Dilakukan dari Lingkup Keluarga dan Melibatkan Seluruh *Stakeholder*

Upaya memberantas korupsi terus dilakukan dan diperbarui pemerintah. Pengetahuan mengenai antikorupsi dimulai dari lingkup organisasi yang paling kecil: keluarga.

Dalam sistem pendidikan formal, antikorupsi diterapkan dengan tiga cara yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran, di luar pembelajaran melalui ekstra kurikuler, dan model pembudayaan atau pembiasaan.

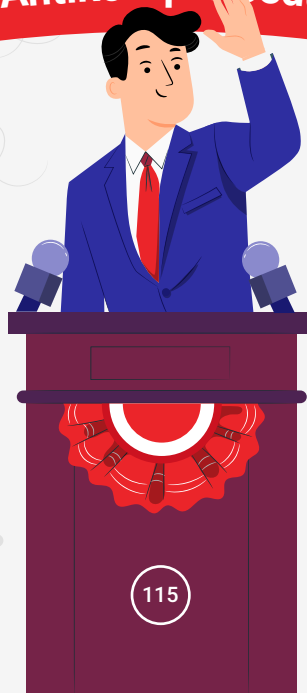
Tiga model tersebut diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bersama sejumlah lembaga pendidikan, termasuk KPK, juga membuat Akademi Antikorupsi yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.



Highlight Presiden RI Saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021:

- 1 Jangan cepat puas pada pemberantasan korupsi
- 2 Pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini oleh seluruh masyarakat
- 3 Penindakan korupsi yang lebih menyeluruh dan fundamental
- 4 *Asset Recovery* dan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hari Antikorupsi Sedunia

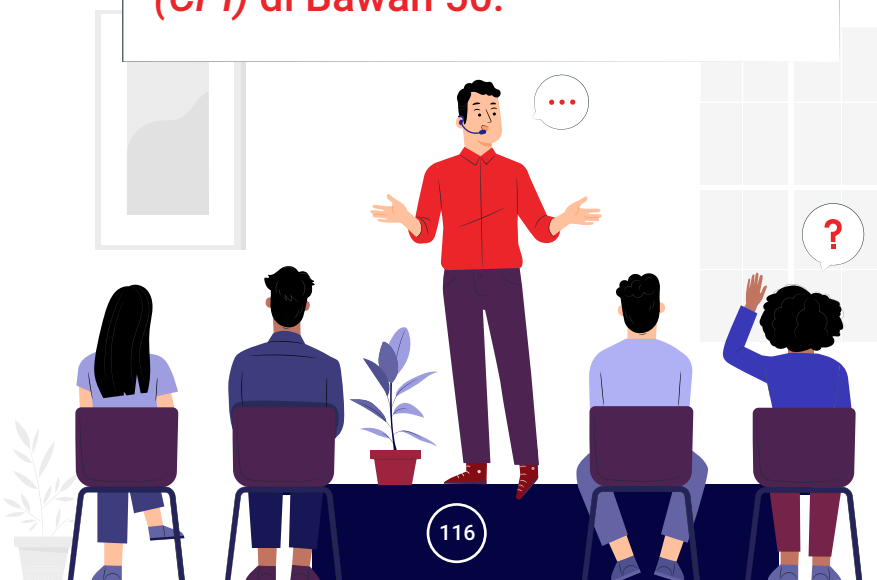


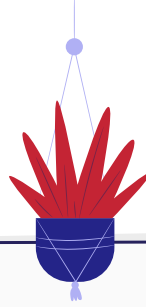
48. Kenapa Topik Antikorupsi Menjadi Pembahasan Penting di Presidensi G20 Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan korupsi merupakan musuh semua bangsa-bangsa di dunia yang memerlukan solusi pemberantasan secara global dengan berbagai bentuk kerja sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berharap forum G20 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi secara global.

47 Persen Anggota G20 Memiliki Skor *Corruption Perception Index (CPI)* di Bawah 50.





5 Negara Paling Bersih dari Praktik Korupsi Menurut *Transparency Internasional* di 2021



Jerman
Skor: **80**



Inggris
Skor: **78**



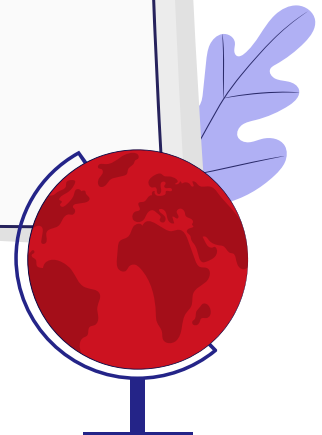
Kanada
Skor: **74**



Australia
Skor: **73**



Jepang
Skor: **73**



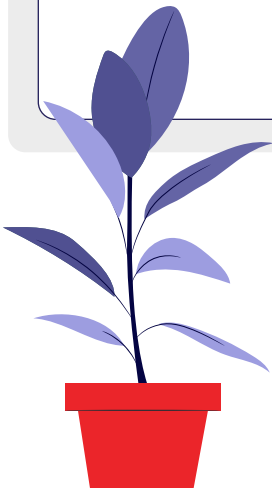
49. Seperti Apa Upaya Indonesia Melalui KPK Memanfaatkan Momentum G20 dalam Pemberantasan Korupsi?



Presidensi Indonesia dalam G20 menjadi kesempatan baik bagi KPK sebagai *Chair* atau Ketua *Anti-Corruption Working Group* (ACWG) untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada upaya-upaya pemberantasan korupsi dunia.

ACWG G20 Mengusung 4 Isu Prioritas:

- ✓ Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi.
- ✓ Partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
- ✓ Pengawasan profesional *enablers* dalam tindak pidana pencucian uang.
- ✓ Korupsi di sektor *renewable energy*.





Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peran aktif dari para profesional hukum, seperti advokat dan pengacara, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

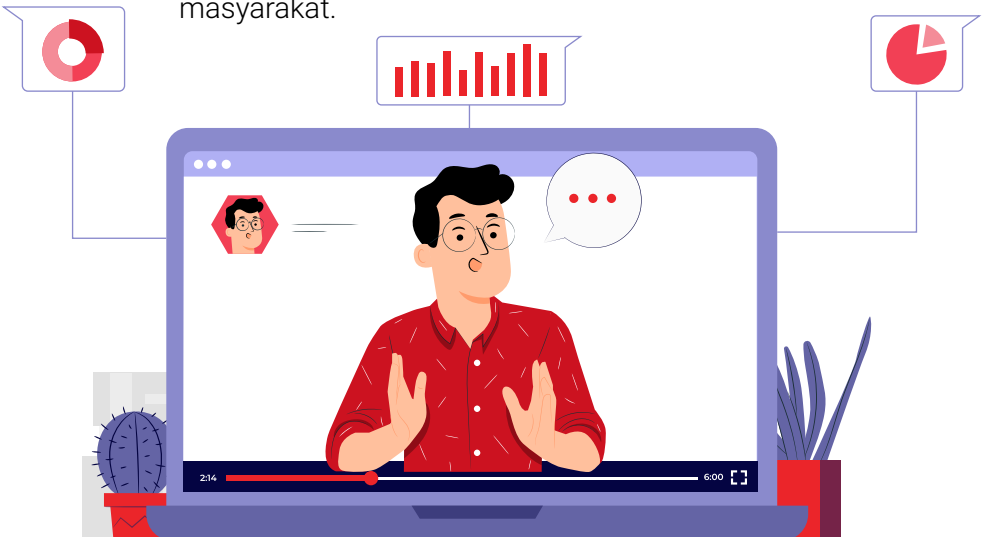
KPK mengusulkan peninjauan terhadap peraturan dan praktik tentang pengawasan peran profesi hukum terkait pencucian uang hasil korupsi untuk masuk dalam rangkuman hasil ACWG G20.

50. Seperti Apa Peran Generasi Muda dalam Upaya Pemberantasan Korupsi?

Pendidikan antikorupsi dan partisipasi publik adalah agenda penting yang didorong dalam Presidensi Indonesia pada G20. Generasi muda dapat berperan secara langsung dalam aksi pemberantasan korupsi dengan mengikuti pendidikan antikorupsi.

Pelatihan secara formal juga dilaksanakan di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, ada pelatihan calon Penyuluh Antikorupsi.

Penyuluh Antikorupsi merupakan 'kepanjangan tangan' KPK sebagai agen perubahan yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga implementasi pendidikan dan penindakan antikorupsi lebih efektif dan efisien, baik di pemerintahan maupun masyarakat.



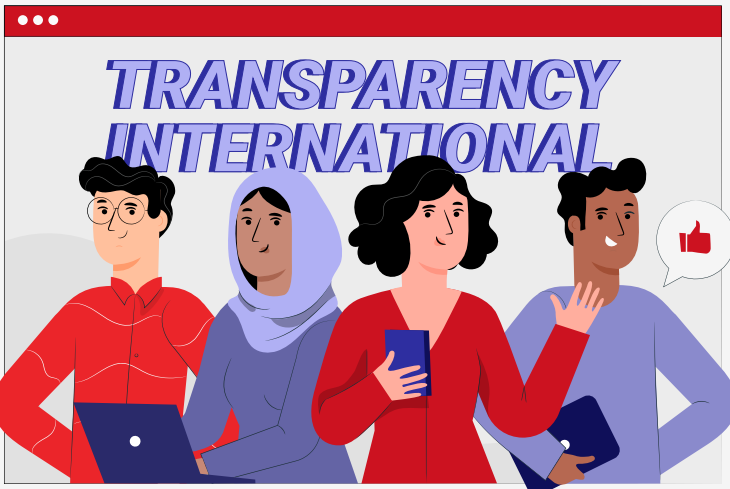


| Mahasiswa Bisa Jadi Penyuluh Antikorupsi

Berdasarkan data KPK per Desember 2021, telah ada 2.047 orang penyuluh antikorupsi dan 228 ahli pembangun integritas yang dibentuk KPK. Mereka terdiri dari lintas profesi termasuk pelajar, lembaga, organisasi di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Untuk menjadi penyuluh bersertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah antikorupsi, menyelesaikan *e-learning* pengetahuan dasar antikorupsi, memiliki pengalaman menyuluh minimal dua kali, dan mempunyai komitmen dalam rencana aksi antikorupsi pasca-sertifikasi.

Apakah yang Dimaksud Indeks Persepsi Korupsi (IPK)?

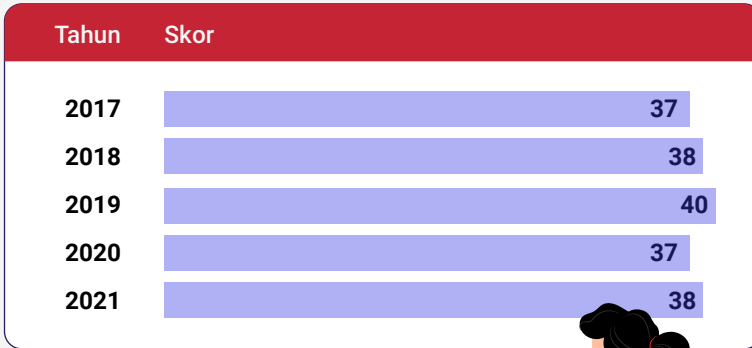


Transparency International adalah organisasi non-pemerintah skala internasional yang bertujuan memerangi ketidakadilan karena korupsi.

Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkannya adalah hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik.

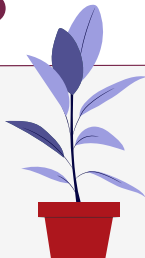
IPK menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Semakin tinggi nilai IPK sebuah negara, semakin rendah pula korupsi di negara tersebut.

IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia



Komunike antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 Terkait Ekonomi Global:

- ✓ Akses keadilan vaksin bagi semua negara.
- ✓ Peningkatan akses terhadap pembiayaan kesehatan.
- ✓ Dialog dan kerjasama pencegahan dan kesiapan pandemi.
- ✓ Penundaan pembayaran utang luar negeri.
- ✓ Penyediaan dana perwalian (*trust fund*).
- ✓ Penyelesaian utang negara miskin melalui kerangka kerja bersama (*common framework*).
- ✓ Implementasi global paket pajak internasional dua pilar G20.
- ✓ Meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di negara berkembang.

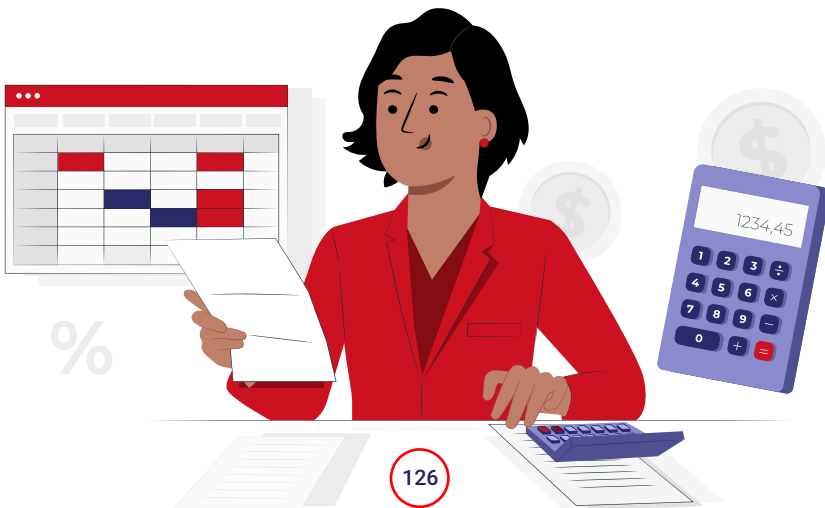


51. Bagaimana Wujud Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Kesehatan Masyarakat?

Pemerintah telah berjuang keras agar Indonesia segera lepas dari pandemi. Sebanyak 6,2 persen dari APBN Tahun Anggaran 2021 atau sebesar Rp169,7 triliun diperuntukkan bagi sisi kesehatan. Angka yang jauh lebih tinggi dari sekitar 5 persen yang ditetapkan secara konstitusi.

Anggaran kesehatan ini menurut Presiden Joko Widodo diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi *supply*, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan *stunting*.

Dan, fokus pemerintah pada bidang kesehatan ini juga berlanjut pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, di mana alokasi anggaran untuk kesehatan adalah sebesar Rp256 triliun atau 9,4 persen dari APBN.





6 Indikator Penanganan Covid-19 Terus Membaik

- 1 Tren kasus positif mingguan nasional turun 7 minggu berturut-turut setelah puncak gelombang ketiga.
- 2 Kasus aktif nasional menurun signifikan 6 minggu terakhir.
- 3 Tren penurunan angka kematian 5 minggu berturut-turut.
- 4 Tren pemulihan kembali meningkat.
- 5 Tingkat *Bed Occupation Rate* (BOR) Nasional turun signifikan dari 40% saat puncak ketiga, menjadi sekitar 4% saat ini.
- 6 *Positivity rate* (jumlah orang terdeteksi positif dari hasil *testing*) menunjukkan tren penurunan signifikan.

52. Apakah yang Dihasilkan oleh *Joint Finance and Health Task Force* dalam Forum G20?

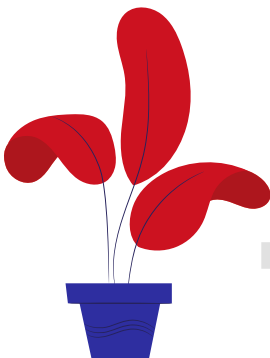
Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) merupakan kelompok kerja yang melibatkan wakil dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang bersinergi dalam merilis kebijakan untuk menyeimbangkan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di masing-masing negara.

Penanganan Covid-19 tetap dilakukan dengan semangat keterbukaan dan kerja sama global dalam membuka akses kepada vaksin serta alat pengetesan Covid-19 dan perlindungan diri.

Namun di sisi lain, negara G20 tetap memberikan dukungan finansial dan insentif lain yang dibutuhkan dunia usaha, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tiga Agenda Prioritas dalam Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global

- 1 Membangun ketahanan sistem kesehatan global.
- 2 Menyelaraskan standar protokol kesehatan global.
- 3 Pengembangan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk *Prevention, Preparedness, dan Response* (PPR) atau pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi.

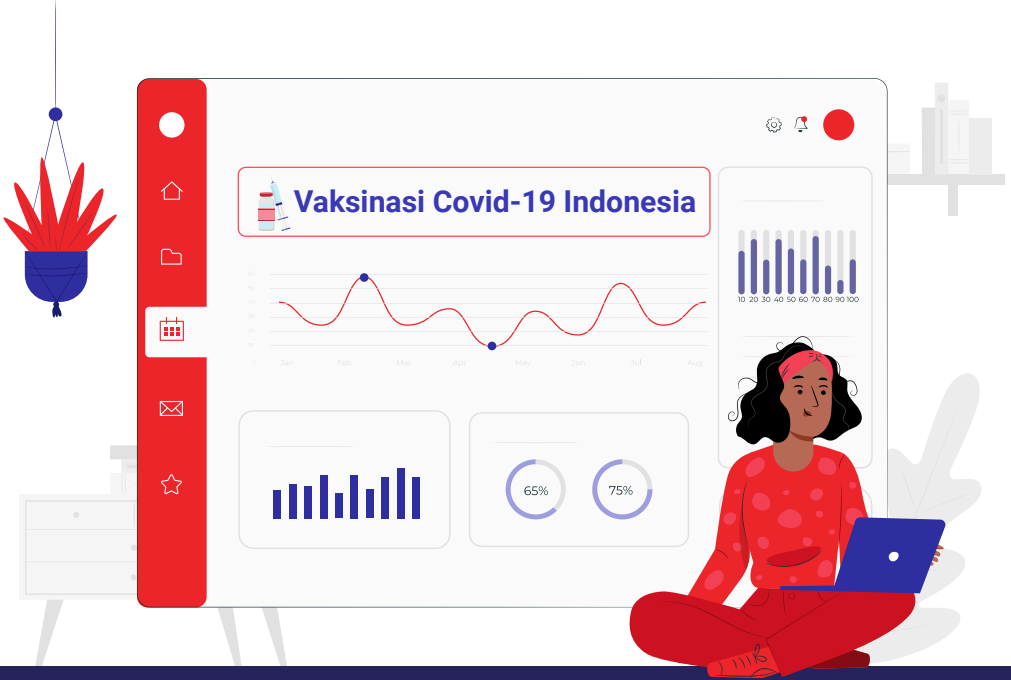


53. Bagaimana Realisasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia?



Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, secara total (vaksin 1, 2, dan *booster*), pemerintah telah memberikan sebanyak 392 juta dosis vaksin Covid-19 kepada 198 juta penduduk Indonesia.

Program vaksinasi juga berhasil meningkatkan kadar antibodi penduduk menjadi 99,2% per April 2022 tepat sebelum libur Lebaran tiba. Berdasarkan sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kadar antibodi masyarakat telah meningkat dari posisi 86,6% pada Desember 2021 lalu.



Realisasi Vaksinasi Covid-19 Indonesia

data per 18 April 2022

Vaksinasi ke-1 **198.248.066**

Vaksinasi ke-2 **162.879.095**

Vaksinasi ke-3 **31.348.872**

(booster)

54. Apakah Pemerintah Melibatkan Pihak Swasta dalam Penanganan Covid-19?

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan layanan *telemedicine* bagi pasien Covid-19 varian Omicron tanpa gejala atau gejala ringan yang melakukan isolasi mandiri.

Pasien tersebut berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di Jabodetabek. Pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis.

Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem *New All Record (NAR)* Kementerian Kesehatan. Saat ini, terdapat 17 *platform telemedicine* yang bekerja sama dengan Kemenkes.

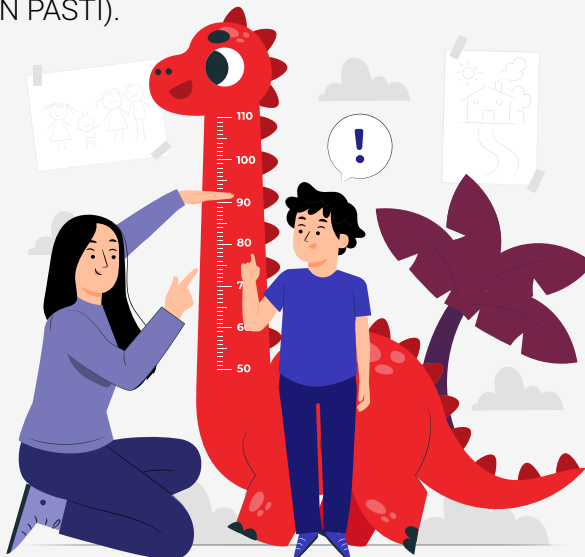


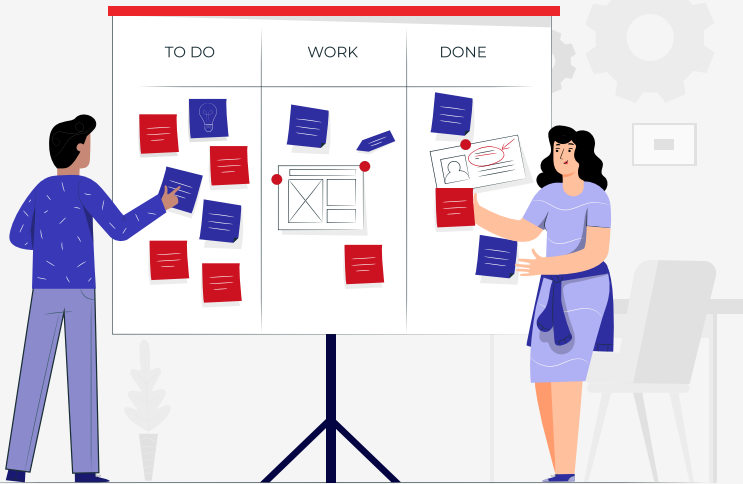
Pencegahan *Stunting* sebagai Upaya Mencapai Indonesia Emas 2045

Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan otak, tumbuh kembang anak juga unsur kognitif.

Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan angka *stunting* di Indonesia terus menurun setiap tahun sehingga pemerintah optimis menargetkan penurunan angkanya menjadi 14% pada 2024.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program strategis melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI).





| Angka *Stunting* Nasional

2019 **27,7%** 2021 **24,4%**

| Upaya Pemerintah Cegah *Stunting*:

- 1 Program pendampingan status gizi dan kesehatan pada calon pasangan usia subur.
- 2 Pengecekan status gizi dan kesiapan kehamilan.
- 3 Pengecekan data, pembinaan dan pengawasan pencegahan *stunting*.

Presiden Jokowi Mendorong

Negara G20 untuk Mencapai Tujuan

Pembangunan SDGs pada 2030

Ketika berpidato di La Nuvallo, Roma, Italia, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan negara G20 perlu fokus dalam mengejar target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Fokus tersebut mencakup tiga hal, pertama, membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Kedua, memperkuat kemitraan global membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang.

Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.



**SDGs
2030**



Tantangan Pembangunan Tujuan Berkelanjutan (SDGs) 2030

- 1 Pemerataan Akses Vaksin.
- 2 Meningkatnya Angka Kemiskinan Ekstrem dari 7,5% di 2021 menjadi 9,4%.
- 3 Inisiatif *Debt Service Suspension* (SDR) dan Tambahan Alokasinya sebesar USD 650 miliar bagi Negara Miskin dan Menengah.
- 4 Melebarnya *Financing Gap* dari USD 2,5 triliun/tahun menjadi USD 4,2 triliun/tahun.
- 5 Risiko Tinggi *Generation Lost* di Bidang Pendidikan.

55. Bagaimana Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan Sebagai Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah menargetkan kemiskinan ekstrem nihil pada 2024, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Target ini enam tahun lebih cepat dari target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) terkait pengentasan kemiskinan yang ditetapkan pada 2030.

TNP2K yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

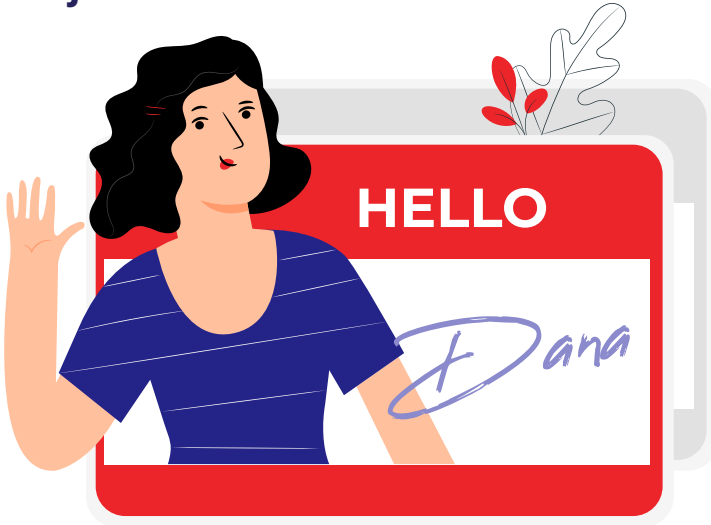
Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dan pemerintah terus melanjutkan program ini di 2022 dengan anggaran Rp28,7 triliun dengan target mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sasaran dan Besaran Bantuan PKH 2022:

- ▶ Ibu Hamil/Nifas menerima sebesar **Rp 3 juta per tahun.**
- ▶ Anak Usia Dini 0 sd 6 Tahun menerima sebesar **Rp 3 juta per tahun.**
- ▶ Pendidikan **Anak SD/Sederajat** menerima sebesar **Rp 900.000 per tahun.**
- ▶ Pendidikan **Anak SMP/Sederajat** menerima sebesar **Rp 1,5 juta per tahun.**
- ▶ Pendidikan **Anak SMA/Sederajat** menerima sebesar **Rp 2 juta per tahun.**
- ▶ **Penyandang Disabilitas berat** menerima sebesar **Rp 2,4 juta per tahun.**
- ▶ **Lanjut Usia** menerima sebesar **Rp 2,4 juta per tahun.**

56. Apakah Program Kartu Prakerja Membantu Pemerintah Mencapai Tujuan SDGs?



Program Kartu Prakerja adalah stimulus dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Kartu Prakerja berupa program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Perwakilan UNDP untuk Indonesia, Norimasa Shimomura mengapresiasi program Kartu Prakerja dan menilai program tersebut mendukung pencapaian agenda SDGs pemerintah Indonesia.



Riset Presisi Indonesia: Manfaat Program Kartu Prakerja

- 1 Program Kartu Prakerja terbukti efektif meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, serta kewirausahaan penerima manfaat.
- 2 Efektif menciptakan pemerataan kompetensi sumber daya manusia di wilayah Jawa dan Luar Jawa.
- 3 Meningkatkan upah pekerja perempuan sekaligus mempersempit kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia.
- 4 Terjadi peningkatan upah 31,6% yang dirasakan kelompok penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur ketika kembali terserap di dunia kerja.
- 5 Survei Presisi Indonesia dilakukan terhadap 2.156 penerima dan non-penerima Kartu Prakerja pada periode September-Oktober 2021.

57. Apa Bukti Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup?

Ketika berbicara dalam KTT G20 di Roma, Italia, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan arti penting Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar dunia.

Presiden menyebutkan Indonesia telah melakukan rehabilitasi tiga juta hektar lahan kritis pada 2010-2019. Indonesia juga menargetkan *net sink carbon* untuk sektor lahan dan hutan selambatnya tahun 2030 dan *net zero* di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan *Net Zero* mulai dikembangkan pada pembangunan *Green Industrial Park* di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan *green product*.

Indonesia juga dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai *carbon pricing* dalam pemenuhan komitmen target NDCs (*Nationally Determined Contributions*).





Poin Penting Hasil Sidang *1st Energy Transitions Working Group* di Yogyakarta:

- 1 Komitmen Bersama Mencapai *Net Zero Emission (NZE)*.
- 2 Merealisasikan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di 2030.
- 3 Kerja Sama dan Kemitraan Teknologi.
- 4 Memperkuat Keamanan dan Ketahanan Rantai Pasokan Energi.

Bagaimana Cara Pemerintah Mencapai Target Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan?



Pemerintah terus berusaha merealisasikan *Paris Agreement* sebagai pemenuhan komitmen SDGs 2030 melalui penurunan gas rumah kaca. Langkah pemerintah tersebut tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.

Dalam rencana tersebut, pemerintah tidak akan memberi izin pembangunan PLTU baru kecuali yang sudah *committed* dan konstruksi, serta juga memberi ruang lebih besar terhadap pengembangan energi terbarukan (EBT) khususnya biomassa.

Langkah Implementasi Biomassa di Era Normal Baru

- 1 Optimalisasi pengembangan biomassa domestik dan penundaan ekspor.
- 2 Pengembangan penelitian dan pengembangan produktivitas tanaman penghasil biomassa.
- 3 Memaksimalkan kontribusi ahli dan akademisi dalam negeri.
- 4 Pengembangan biomassa berdasarkan potensi lokal.
- 5 Pemanfaatan lahan marginal dan terdegradasi dalam pengembangan *energy crops* spesies unggulan.
- 6 Pengembangan pola kerjasama dan kelembagaan dengan digitalisasi.



Presidensi G20 Indonesia

Berperan Besar dalam Memimpin

Aksi Global Menuju Pemulihan

yang Kuat, Berkelanjutan,

Seimbang dan Inklusif

Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerja sama dalam membahas upaya bersama menghadapi permasalahan dunia, yakni pandemi, perubahan iklim, perlindungan negara miskin serta dampak rambatan dari konflik geopolitik.

Indonesia menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme sesuai dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.



Poin Penting Hasil Pertemuan Kedua IMF-World Bank Group 2022 dan 2nd Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG):

- 1 Pembentukan *Resilience and Sustainability Trust (RST)*.
- 2 Pemenuhan ambisi global sebesar USD 100 M sebagai kontribusi sukarela bagi negara yang membutuhkan.
- 3 Pentingnya Pembangunan Multilateral (MDB) untuk pembangunan di negara rentan.

58. Apakah Dampak Positif dari Pelaksanaan *Side Event* G20 bagi Masyarakat?



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan *side event* G20 terkait pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menciptakan 10 ribu hingga 15 ribu lapangan kerja baru selama pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia.

Tidak hanya terpusat di Bali, Kemenparekraf juga menggelar *side event* G20 di sejumlah kota, seperti Solo, Jawa Tengah, Labuan Bajo, NTT, serta DKI Jakarta. *Side event* G20 juga berfungsi sebagai medium promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air kepada dunia.



| *Creative Hub* Puncak Waringin

Lokasi Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT.

Luas 1.700 meter persegi.

Rumah Tenun Area kios kuliner, pameran, hingga berbagai workshop subsektor kriya.

Rumah Souvenir Ruang pameran sekaligus menjual cinderamata karya pelaku ekonomi kreatif lokal.

59. Apa Fungsi *Creative Hub* Puncak Waringin?



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan Puncak Waringin menjadi simbol pusat kolaborasi dan sarana bertukar informasi antara pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong *multiplier effect* ke sektor lainnya.

Berbagai hal telah dipersiapkan dengan matang demi pemanfaatan *Creative Hub* Puncak Waringin untuk membangkitkan laju ekonomi kreatif di Labuan Bajo.



Persiapan *Creative Hub* Puncak Waringin Menyambut G20

- 1 Meningkatkan jumlah hotel dan restoran untuk para wisatawan yang berkunjung.
- 2 Penataan interior *Creative Hub* di Puncak Waringin yang akan menampilkan nilai kreativitas, estetika, serta kearifan lokal khas masyarakat Manggarai.
- 3 Pendampingan pada setiap pelaku ekraf dalam mengembangkan tata kelola, peningkatan layanan, dan pemasaran produk ekraf.
- 4 Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan komunikasi baik 4G maupun 5G dapat tersebar secara merata di berbagai titik lokasi wisata di Labuan Bajo.
- 5 Penyelenggaraan festival dan kompetisi seperti Flores the Singing Island, Flores Writers Festival, dan Ideathon #RinduLabuanBajo atau dikenal dengan kompetisi ide.

60. Apa Strategi dalam Pengembangan DSP Borobudur?

Penguatan rantai pasok merupakan salah satu isu strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur dengan mendorong pemanfaatan produk-produk buatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemparekraf/Baparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung menyebutkan penguatan rantai pasok ini dilakukan sebagai upaya pengembangan UMKM yang mampu menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di Indonesia dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen.





Candi Borobudur

Penguatan rantai pasok dilakukan mulai:

- Tahap *supply*
- Tahap *demand*
- Tahap *matchmaking*
- Tahap *sustainable supply chain*

Langkah Kemenparekraf dalam Menyiapkan SDM Unggul di Sektor Pariwisata dan Ekraf

Kemenparekraf memiliki enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu Politeknik Negeri Pariwisata (Poltekpar) yang tersebar di Bali, Medan, Makassar, Palembang, Lombok, dan Bandung (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung).

Poltekpar membuka beberapa program studi seperti: Diploma 3 Manajemen Tata Boga/ Kuliner, Diploma 4 Administrasi Perhotelan, Diploma 4 Kepariwisataan dan Diploma 4 Manajemen Perhelatan/Event dan MICE.

Menparekraf Sandiaga Uno menyebutkan Poltekpar adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencetak SDM di sektor pariwisata yang berkualitas, kreatif dan inovatif di masa mendatang. Berdasarkan data Kemenparekraf, lulusan Poltekpar sebanyak 30% telah membuka usaha sendiri dan 70% lainnya terserap di industri pariwisata.





Target Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Pembentukan PDB

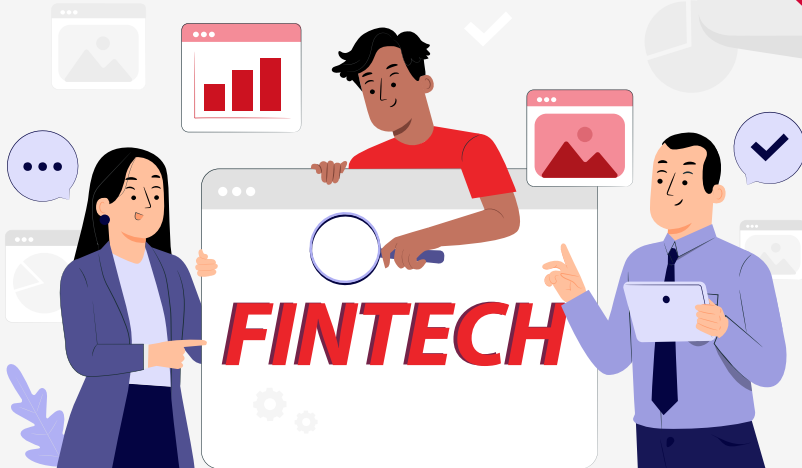
	2021	2022	2023	2024
Nilai Pariwisata Domestik (miliar USD)	4,8-8,5	10,6-11,3	16,9-18,9	21,5-22,9
Kontribusi PDB (%)	5	5,2	5,3	5,5
Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif (miliar USD)	17,45	25,33	26,46	27,53

Bentuk Nyata Dukungan Pemerintah dalam Implementasi Digitalisasi Ekonomi di Indonesia

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia berkomitmen mendukung perkembangan dan kontribusi industri *fintech* terhadap penguatan ekonomi digital nasional melalui regulasi yang dapat memacu inovasi layanan keuangan digital, serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat sebagai pengguna.

Pelaku industri *fintech* diharapkan dapat mempercepat akselerasi program inklusi keuangan yang telah dicanangkan pemerintah.





Kontribusi *Fintech* terhadap Program Pemerintah

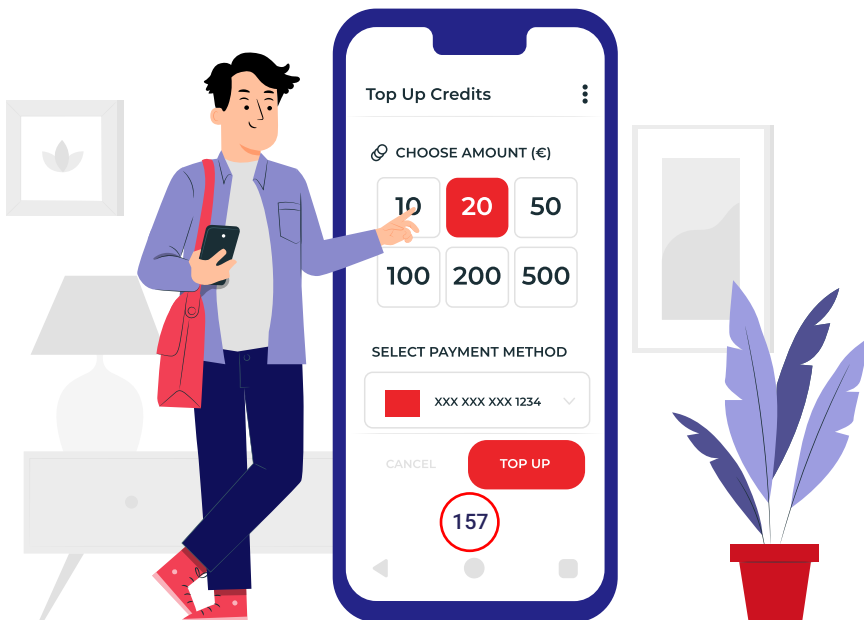
- 1 Penjualan SBN retail *online* melalui *fintech* tumbuh 7,9% pada ORI16 pada tahun 2019 menjadi 11,9% pada ORI17 di tahun 2020.
- 2 Penyaluran bansos nontunai di masa pandemi.
- 3 Pendistribusian Kartu Prakerja, dimana 5,3 juta penerima baru memiliki rekening bank atau *e-wallet* setelah mengikuti program.
- 4 Penggunaan *e-money* untuk media pembayaran transportasi.
- 5 Pelaporan dan pembayaran pajak *online*.

61. Mengapa G20 Fokus Membahas Masalah Akses Keuangan Digital Bagi Generasi Muda?

Indonesia telah membuka Pra-KTT ke-2 Youth 20 (Y20) Indonesia 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan pembahasan mengenai peningkatan kesadaran anak muda terhadap keuangan digital.

Forum Y20 hadir untuk memberikan solusi nyata mengatasi ketimpangan akses internet dan literasi digital. Co-Chair Y20 Indonesia 2022 Budy Sugandi mengatakan layanan keuangan digital tumbuh pesat di tengah pandemi Covid-19.

Sayangnya, masih banyak populasi dunia yang belum menikmati manfaat ekonomi digital. Bahkan survei Y20 Indonesia dan Cint menunjukkan 61 persen anak muda di negara-negara G20 kesulitan mengakses internet, termasuk koneksi yang tidak stabil dan lambat.





I Fokus Forum Y20

- 1 Menyoroti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran keuangan digital di kalangan generasi muda.
- 2 Masyarakat khususnya di negara berkembang masih lebih mengandalkan uang tunai (*cash*).
- 3 Kemajuan teknologi digital berdampak pada generasi muda. Tetapi sejumlah kerangka kerja publik masih ambigu. Intervensi pemerintah khususnya di negara G20 perlu menjadi contoh.

62. Apa Harapan Indonesia Terkait Literasi Keuangan Digital dalam Forum G20?



Indonesia berharap forum G20 dapat memberikan solusi efektif untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Survei Bank Dunia memprediksi indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen pada 2070, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, indikator ini menyoroti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global, sehingga juga menjadi salah satu fokus dalam Presidensi G20 Indonesia.

Dalam Presidensi Indonesia di G20, Pemerintah Memfokuskan Pembahasan Inklusi Keuangan pada:

- 1 Kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital.
- 2 Pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk *fintech* sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- 3 Implementasi kebijakan yang baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah.



63. Upaya Pengenalan Literasi Keuangan melalui Gamifikasi

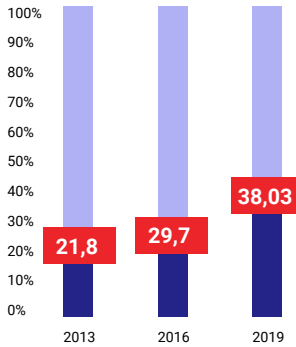
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2019 menyebutkan tingkat literasi keuangan mencapai 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%. Akselerasi adopsi transaksi digital pascapandemi dan meningkatnya akses internet di kalangan generasi Z, gamifikasi dapat dijadikan alternatif metode untuk mendukung literasi keuangan.

Di bidang finansial, terdapat berbagai aplikasi dan layanan digital yang memanfaatkan gamifikasi yang mendorong penggunaannya untuk menabung, mengelola anggaran termasuk meningkatkan literasi keuangan.

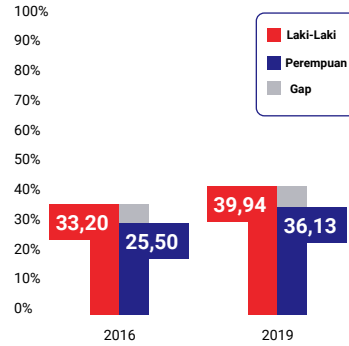
Gamifikasi juga dapat digunakan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya belum terpapar informasi produk keuangan secara komprehensif.



Indeks Literasi Keuangan



Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Gender



Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah

Pedesaan

2016 **23,9** 2019 **34,54**



Perkotaan

2016 **33,2** 2019 **41,4**



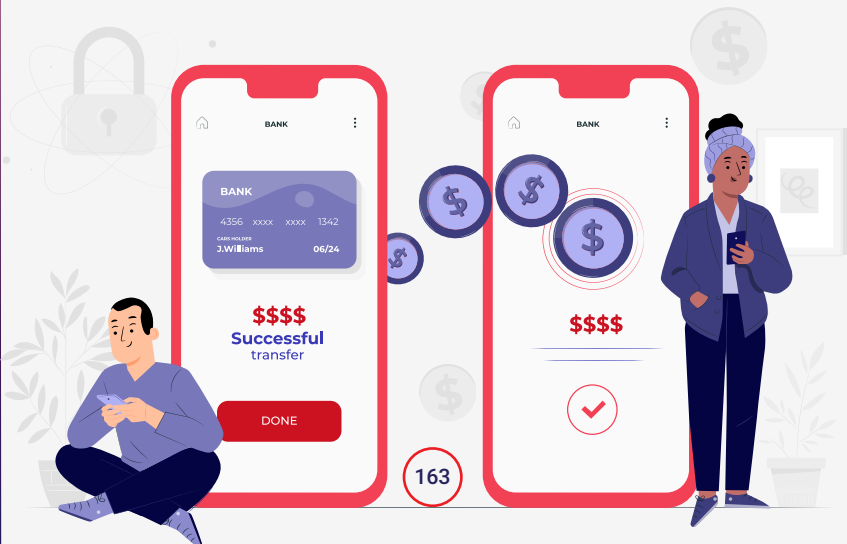
Mengapa Bank Indonesia

Membahas Sistem Pembayaran

Lintas Negara dalam G20?

Bank Indonesia mengusung sistem pembayaran berbasis *Quick Response (QR) Code* sebagai sistem pembayaran global dalam forum G20. Saat ini, *Quick Response Code Indonesia Standard* atau QRIS telah diterapkan secara luas di Indonesia.

Harapannya, sistem *QR Code* dapat digunakan sebagai sistem pembayaran lintas negara (*Cross-border*). *QR Code* dapat mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, mengurangi penggunaan uang kartal, menciptakan transaksi ekonomi yang lebih efisien, peningkatan penggunaan mata uang lokal serta menjaga kestabilan ekonomi makro di dalam negeri.





BI Uji Coba QR Cross-border dengan Negara Tetangga

Bank Indonesia pun telah melakukan uji coba *QR Cross-border* dengan Malaysia dan Thailand yang memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui *QR Code*.

QR Cross-border disinyalir dapat meningkatkan transaksi UMKM, karena memudahkan konsumen mancanegara untuk bertransaksi saat membeli produk lokal. Begitu pula di sektor pariwisata, wisatawan asing nantinya cukup menggunakan *QR Cross-border* jika ingin bertransaksi di Indonesia.

Pemerintah Menjalankan Lima

Strategi Khusus dalam Memanfaatkan

Bonus Demografi sampai 2045



Sampai tahun 2045, struktur penduduk Indonesia akan didominasi angkatan muda produktif. Karenanya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjalankan lima strategi.

Pertama, peningkatan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan yang dimulai sejak anak dalam kandungan, termasuk Posyandu untuk tumbuh kembang.

Kedua, pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun didukung Kartu Indonesia Pintar, BOS, revitalisasi sekolah, dsb.

Ketiga, peningkatan akses lulusan menengah atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Keempat, membantu lulusan perguruan tinggi mendapat pekerjaan melalui Program Kartu Prakerja.

Kelima, adalah memberikan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan mewujudkan kesejahteraan warga lanjut usia.

Profil Angkatan Kerja di Indonesia per Februari 2022



Penduduk Usia Kerja
**208,54 juta
orang**

Dari total 208,54 juta penduduk usia kerja,
persentase penduduk terdampak Covid-19
hanya sebesar **5,53%**

**0,96 juta
orang**

pengangguran karena Covid-19

**0,55 juta
orang**

bukan angkatan kerja karena
Covid-19

**0,58 juta
orang**


tidak bekerja karena Covid-19

**9,44 juta
orang**

bekerja dan mengalami pengurangan
jam kerja karena Covid-19

64. Apakah Manfaat Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan?

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selaku ketua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (*Employment Working Group*) menggelar pertemuan kedua pada 10-12 Mei 2022 di Yogyakarta.



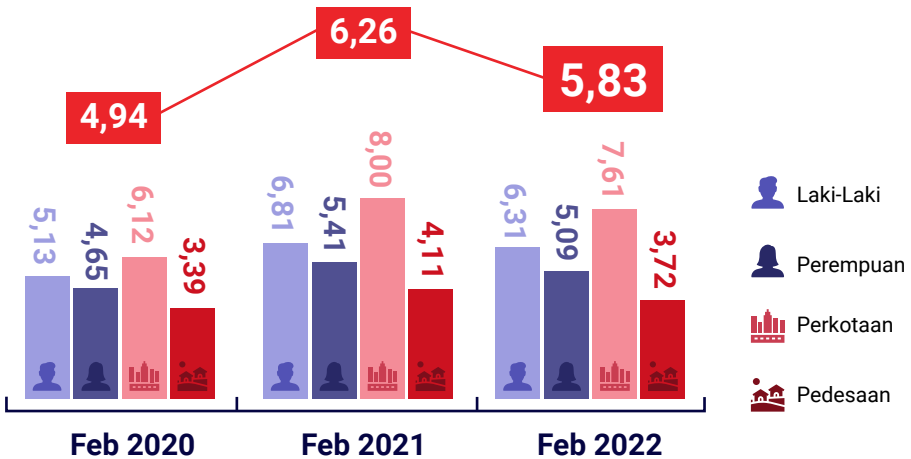
Dalam pertemuan tersebut, Kemnaker membahas dua isu prioritas. Pertama, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju dunia kerja yang berubah, melalui fokus kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM).

Isu prioritas kedua yang dibahas adalah adaptasi perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan bagi seluruh pekerja.

Sebelumnya, pada pertemuan pertama *EWG Meeting* yang digelar secara virtual di Jakarta, dilakukan pembahasan mengenai isu perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.



Profil Ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2022



Dalam persen

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,43% poin dibandingkan Februari 2021

65. Apa Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Kemajuan Wirausaha Tanah Air?

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan berupa akses pembiayaan yang murah hingga program pelatihan dan pendampingan untuk UMKM naik kelas.

Atas kendala keterbatasan modal usaha misalnya, pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen.



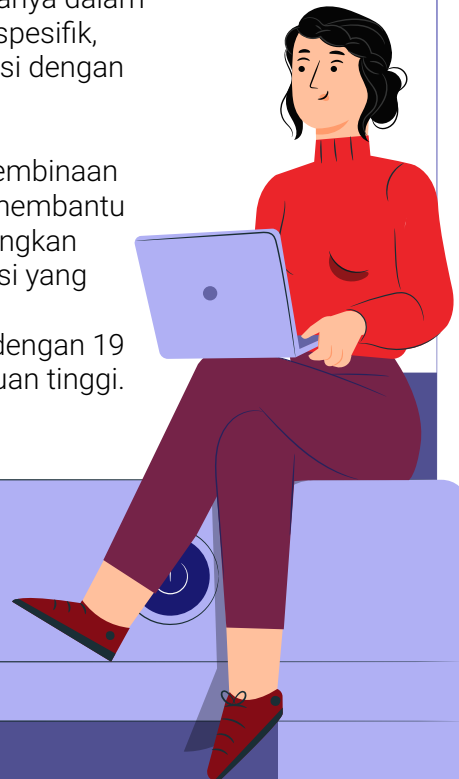
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga memiliki sejumlah program dalam mendongkrak rasio kewirausahaan.

Mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Re-Desain Program PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM), Program Entrepreneur Financial Fiesta, hingga program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022.

Program Patenpreneur 2022 merupakan program nasional untuk memfasilitasi pelaku usaha mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

Dua Metode Implementasi Program Patenpreneur 2022

- 1** Konsultasi bisnis, bertujuan membantu wirausaha yang sudah berjalan usahanya dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik, dengan cara difasilitasi sesi konsultasi dengan seorang pakar.
- 2** Pendampingan usaha, merupakan pembinaan terstruktur selama dua bulan untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya. Selain itu, terdapat inkubasi yang dilakukan selama enam bulan oleh KemenKopUKM yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi.



66. Apa Upaya Indonesia untuk Tingkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja?



Mendorong kepemimpinan wanita di perusahaan atau sektor swasta adalah salah satu agenda Presidensi Indonesia di G20. Kepemimpinan wanita didorong melalui aliansi *G20 Empower*, untuk mendorong perusahaan dalam mempromosikan kesetaraan *gender* di dunia kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyatakan Indonesia sangat mendukung hasil G20 Brisbane pada 2014 yang berfokus menutup kesenjangan partisipasi kerja ini antara laki-laki dan perempuan sebesar 25 persen pada 2025.



I 3 Isu Prioritas di G20 *Empower*

- 1** Akuntabilitas terhadap *Key Performance Indicators* (KPI) dari perusahaan untuk mendorong kepemimpinan dan penguatan posisi perusahaan di dunia kerja.
- 2** Upaya pihak swasta dan Pemerintah untuk terus mendorong dan mendukung peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak ekonomi.
- 3** Membangun kesiapan perempuan di masa depan dalam ekonomi digital.

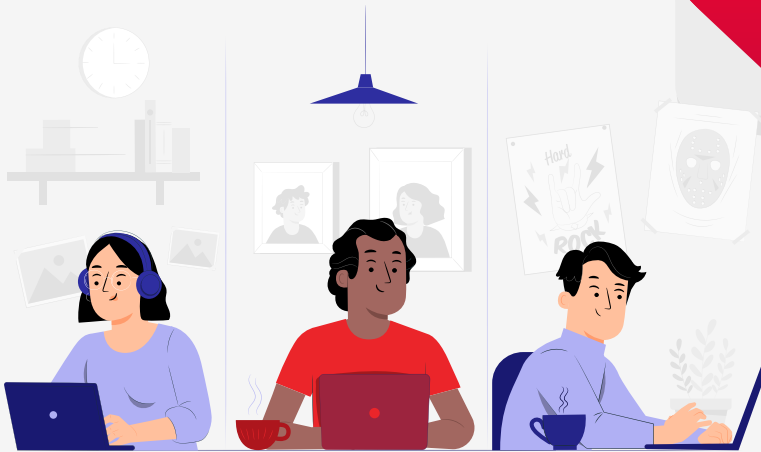
Mengapa Indonesia Harus Fokus pada Pengembangan Ekonomi Digital di Masa Mendatang?



Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda saat ini untuk menjadi agen perubahan menghadapi bonus demografi dalam rangka mencapai visi Indonesia Maju 2045. Pada 2030, Indonesia bakal membutuhkan sekitar 17 juta tenaga kerja di bidang ekonomi digital.

Oleh karena itu, pemerintah akan menggenjot literasi digital generasi muda termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi kerja agar bisa terserap di ekosistem digital yang sernakin maju.

Berdasarkan estimasi resmi pemerintah, ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh 8 kali lipat dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun pada 2030. Otomatis, ekonomi digital bakal menjadi lokomotif perekonomian Tanah Air.



Program Gerakan Nasional Literasi Digital

Program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjangkau 12,5 juta peserta secara nasional pada 2021. Program ini ditargetkan dapat menjangkau 50 juta peserta dari semua elemen masyarakat pada 2024.

Program GNLD Siberkreasi memiliki program pelatihan tingkat dasar, Program *Digital Talent Scholarship (DTS)* untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Program *Digital Leadership Academy (DLA)* tingkat kecakapan tingkat atas.

Pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menasar empat pilar literasi digital, yaitu:

1 Digital Ethics

3 Digital Skill

2 Digital Safety

4 Digital Culture

Pemerintah dalam Presidensi G20 Menargetkan Indonesia sebagai Negara Adidaya Kebudayaan



Pada *1st Senior Officials Meeting (SOM)* yang digelar sebagai awal rangkaian kegiatan G20 di bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengangkat tema Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan.

Direktur Jenderal Kemendikbudristek Hilmar Farid menyebutkan dua tujuan utama kepemimpinan G20 bidang kebudayaan yakni membangun konsensus global untuk normal baru yang berkelanjutan serta menginisiasi agenda pemulihan global melalui pembentukan jaringan aksi bersama di bidang kebudayaan.



- 1 Peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan.
- 2 Dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya.
- 3 *Cultural Commoning* (pengelolaan sumber daya budaya) yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan.
- 4 Akses yang berkeadilan untuk peluang ekonomi budaya.
- 5 Mobilisasi sumber daya internasional dalam pemulihan berkelanjutan melalui pendanaan bidang seni budaya pascapandemi.

67. Apa Bentuk Usulan Indonesia untuk Pendanaan Kebudayaan Secara Global dalam Presidensi G20?

Indonesia mengusulkan pendanaan global untuk membantu pelaku seni dan budaya yang terdampak pandemi Covid-19. Pendanaan global seni dan budaya yang diusulkan menggunakan pendekatan program Dana Abadi Kebudayaan, atau Dana Indonesiana yang baru diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dana Indonesiana diharapkan memperbesar peluang akses para budayawan dan pelaku seni mendapatkan dana untuk merepresentasikan atau menyalurkan ekspresinya melalui berbagai saluran.



Dengan dukungan dari negara-negara anggota G20, negara-negara undangan khusus, dan UNESCO, platform pendanaan kebudayaan 'Global Arts and Culture Recovery Fund' bisa terwujud dan berperan sebagai sarana pendukung pemulihan sektor ekonomi kebudayaan, terutama di negara-negara berkembang yang terdampak pandemi.




Dampak Pandemi terhadap Pelaku Seni dan Budaya

Pandemi Covid-19 memiliki dampak jangka panjang terhadap ekosistem kebudayaan. Riset Ditjen Kebudayaan Kemdikbudristek pada Agustus 2021 menemukan fakta bahwa 65% pelaku budaya sudah tidak bekerja serta sekitar 70% ruang publik dan organisasi kebudayaan tidak aktif.

Akibatnya, pendapatan pelaku budaya menurun hingga 70%. Dana Indonesiana dapat dimanfaatkan baik individu, komunitas, organisasi atau lembaga seni budaya. Proposal dapat diajukan secara daring di laman Dana Indonesiana. Proposal akan diseleksi oleh Komite Seleksi dan Dewan Pengarah Program yang terdiri dari pegiat seni budaya.

68. Tentang Dana Indonesiana



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan meluncurkan **Dana Abadi Kebudayaan** atau **Dana Indonesiana** yang nilainya mencapai **Rp 5 triliun**.

Sebelumnya Kemenkeu telah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk Dana Indonesiana pada 2020, kemudian Rp 2 triliun lagi pada 2021.

Alokasi dana ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dana untuk pelaku seni dan budaya ini disebut dana perwalian kebudayaan dalam undang-undang.

| Program Dana Indonesiana Meliputi:



1 Fasilitas Bidang Kebudayaan yang mencakup:

- A Fasilitas Bidang Kebudayaan 2022.
- B Fasilitas Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya.



2 Pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang mencakup:

- A Dukungan Institusional bagi Organisasi Kebudayaan.
- B Pendayagunaan Ruang Publik.
- C Kegiatan Strategis.
- D Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya.
- E Dokumentasi Karya/ Pengetahuan Maestro.
- F Penciptaan Karya Kreatif Inovatif.
- G Dana Pendampingan Karya untuk Distribusi Internasional.
- H Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan.

3 Beasiswa Pelaku Kebudayaan

69. Apa Manfaat *Culture Recovery Fund* yang Disalurkan Pemerintah Inggris?

Cultural Recovery Fund merupakan *grant* atau dana hibah pemerintah Inggris. Sejak Agustus 2020, *Culture Recovery Fund* telah mengalir kepada 5.000 organisasi seni dan budaya Inggris, dengan nilai dana sebesar GBP 1,57 miliar (sekitar Rp 2,45 triliun).

Dana tersebut disalurkan kepada teater, museum, bioskop independen, studio dan tempat musik serta organisasi lain yang terimbas pandemi.

Dana diberikan pemerintah untuk memastikan dukungannya kepada penyelenggaraan festival, pertunjukan seni kelas dunia dalam melewati masa sulit selama pandemi Covid-19.

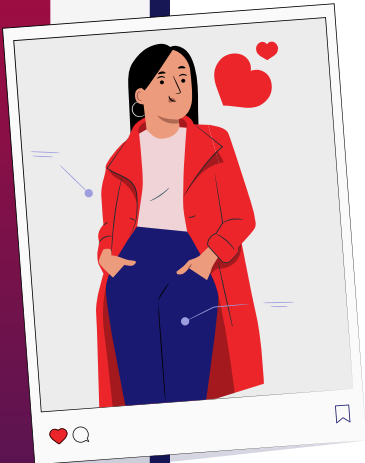




Tujuan Pembentukan *Culture Recovery Fund* oleh Pemerintah Inggris

- 1 Memberi rekomendasi alokasi hibah terbesar dan kompleks.
- 2 Membuat keputusan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Memberi jaminan hibah pendapatan sampai di bawah GBP 1 juta.
- 4 Mengawasi dan mengukur risiko penyelenggaraan program.

Mengapa Tren *Fashion* menjadi Topik Pembahasan dalam *Senior Officials Meeting G20?*



Selain rentan gejolak, gaya hidup masyarakat masa kini penuh dengan eksploitatif yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya tren mode cepat atau *fast fashion*.

Berdasarkan data Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD), industri mode merupakan industri paling berpolusi setelah perminyakan. **Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri mode sebesar 1,2 miliar ton per tahun.**

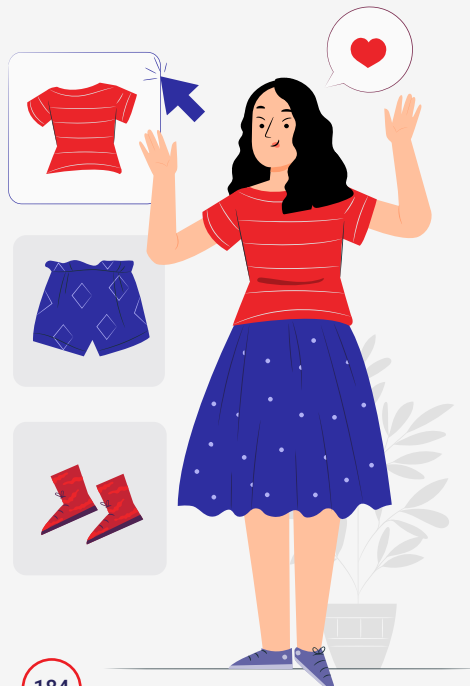




Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Hilmar Farid menyatakan, topik gaya hidup termasuk tren mode, menjadi pembahasan dalam forum *Senior Officials Meeting (SOM) G20*.

Sebelum dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20 pada 12-13 September 2022. Tren *fast fashion* harus ditelaah dan dievaluasi.

Hasil evaluasi menjadi dasar menyusun kesepakatan atau kebijakan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan sosial-ekologis berdasarkan keragaman sumber budaya.



Indonesia Turut Ambil Bagian dalam Menciptakan Dunia Lebih Baik Melalui Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)



Pada 23-28 Mei 2022, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7* yang bertema "*Fostering Collaboration towards Sustainable Resilience*".

GPDRR 2022 bertujuan untuk meningkatkan upaya PRB melalui komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi dan institusi internasional, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan, akademisi dan swasta untuk berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis pelaksanaan kerangka global PRB atau *Sendai Framework for DRR 2015-2030*.

Poin Penting Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana:



Sumber Dana

- 1 APBN
- 2 APBD
- 3 Sumber dana lain yang sah seperti klaim asuransi, hibah, kerjasama pihak lain, dana perwalian



Pengembangan Dana

- 1 Investasi jangka pendek
- 2 Investasi jangka panjang



Pengelolaan Dana Bersama

- 1 Pengumpulan dana
- 2 Pengembangan dana
- 3 Penyaluran dana
- 4 Penugasan lain sesuai dengan menteri



Pengelolaan Dana Bersama Memenuhi Prinsip

- 1 Kehati-hatian
- 2 Transparansi
- 3 Akuntabilitas
- 4 Tepat waktu
- 5 Tepat sasaran

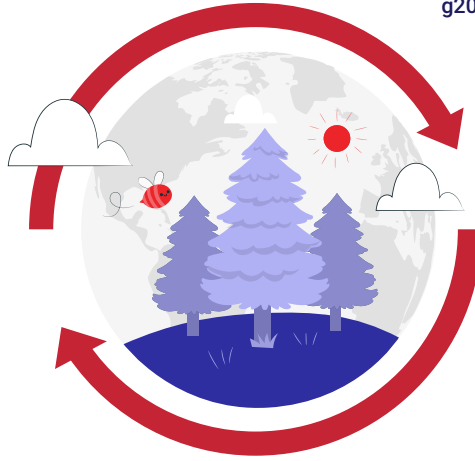
70. Sejauh Mana Implementasi dan Kemajuan dari *Sendai Framework*?

Dalam acara *Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR)* sesi ke-7 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Direktur Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) Ricardo Mena mengungkapkan hanya 120 dari 187 negara yang mengadopsi kesepakatan *Sendai Framework* telah melaporkan tentang capaian yang telah ditetapkan dalam *framework* tersebut (Target G).

Sementara *Sendai Framework* telah berlaku sejak 2015 dan seluruh komitmen diharapkan dapat tercapai pada 2030.

***Sendai Framework* mengedepankan tujuh target global termasuk Target G, yang secara substansial bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini bencana serta informasi dan penilaian risiko bencana untuk masyarakat.**





Dalam forum GPDRR 2022 ini, Presiden Indonesia Joko Widodo menawarkan kepada dunia empat konsep resiliensi berkelanjutan kebencanaan, yakni sebagai berikut:

- 1 Pentingnya untuk memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana.
- 2 Setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan *transfer* teknologi.
- 3 Membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.
- 4 Komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.

71. Mengapa PBB Meminta Negara G20 Berinvestasi di Manajemen Kebencanaan?

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berharap, Presidensi G20 Indonesia dapat mendorong negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi di sektor kebencanaan.

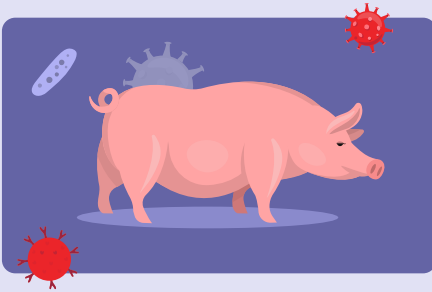
Investasi kebencanaan dapat dilakukan melalui berbagai program dan aksi untuk mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, kawasan, dan global. PBB ingin G20 dapat menjadi contoh sekaligus penggerak dalam meningkatkan kewaspadaan dan manajemen risiko bencana bagi dunia.



Sebab, program mitigasi bencana memerlukan pembiayaan yang cukup besar, sehingga membutuhkan upaya bersama. Risiko kebencanaan bukan hanya datang dari bencana alam maupun kecelakaan.

Tetapi, sumber bencana juga disebabkan oleh wabah penyakit, seperti pandemi Covid-19. Otomatis, negara-negara di dunia harus bersiap dengan rencana penanggulangan yang dapat meminimalisir dampak bencana.

| Bencana Pandemi Besar Dunia



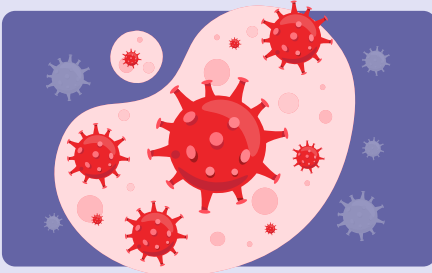
Wabah Penyakit Flu Babi

- Tahun **2009-2010**
- Korban Jiwa **200 ribu**



Wabah Penyakit Ebola

- Tahun **2014-2016**
- Korban Jiwa **11.300 ribu**



Wabah Penyakit Covid-19

- Tahun **2019-Sekarang**
- Korban Jiwa **6,29 Juta***

**Per 30 Mei 2022*

72. Apa Usaha Swedia Memitigasi Ancaman Bencana di Laut Baltik?

Di forum *Working Group Meeting* G20, Swedia sebagai negara sahabat Indonesia membagikan pengalamannya mengelola Laut Baltik yang mengalami pencemaran, kerusakan fisik, biologis, dan kimia.



Pemerintah Swedia melalui lembaga *Swedish Agency for Marine and Water Management (SwaM)* yang dipimpin Jacob Granit adalah pemegang otoritas untuk merestorasi dan menjaga kelestarian laut dan sumber air tawar, termasuk manajemen perikanan.

Swedia tak bekerja sendirian melakukan penataan ulang pemanfaatan laut dengan konsep *blue economy* namun bersama negara sekawasan juga dibantu Uni Eropa.

Atas usaha ini, *International Labour Organization (ILO)* mencatat tata kelola baru atas kawasan laut dan daratan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan ini memberi banyak kesempatan dan lapangan kerja baru yang berkualitas.



| Kondisi yang Dihadapi Laut Baltik

Perubahan iklim telah mempengaruhi seluruh permukaan di planet bumi, termasuk di Baltik yang tersembunyi di balik semenanjung besar Skandinavia.

Sebagai salah satu lautan dengan lalu lintas perniagaan tersibuk di dunia, Laut Baltik tak lepas dari pengaruh pencemaran baik dari polusi udara, air, limbah, dan sampah plastik.

Munculnya gelombang air panas di Baltik juga membuat kualitas perairan semakin buruk dan makhluk laut terancam. Selain itu, pengelolaan penangkapan ikan juga buruk.

Rumah Resiliensi Indonesia

Sarana Berbagi Solusi

Kebencanaan

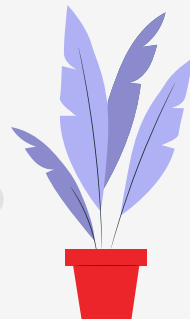
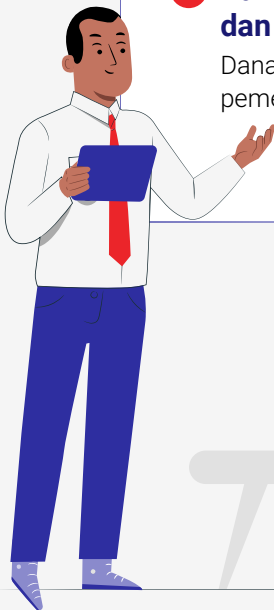
Rumah Resiliensi Indonesia hadir di Pameran Solusi Kebencanaan Adexco 2022 di Bali *Art Collection*, Badung, Bali. Di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo meninjau langsung sejumlah stan yang menampilkan inovasi dalam memberikan solusi serta mitigasi kebencanaan dan tempat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dalam penanganan risiko bencana.

Rumah Resiliensi Indonesia merupakan kumpulan para pegiat dan komunitas seperti organisasi kemasyarakatan maupun *volunteer* dan juga filantropi yang memiliki kepedulian dalam hal pengurangan risiko bencana di Indonesia.



Tahapan Mekanisme Penanggulangan Bencana di Indonesia:

- 1 Tahap pra bencana**
Berupa dana kontijensi bencana K/L melalui APBN.
- 2 Tahap tanggap darurat**
Pemerintah mengalokasikan dana siap pakai (*oncall*) melalui APBN.
- 3 Tahap pascabencana/rehabilitasi dan rekonstruksi**
Dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.



Presidensi G20 Indonesia Menekankan Pentingnya Peran dan Kerja Sama Anggota G20 dalam Menjaga Stabilitas Dunia



Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartanto di *World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022* di Davos, Swiss menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan global yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.

Permasalahan geopolitik memberikan tantangan bagi Presidensi G20 Indonesia karena mempertanyakan eksistensi G20 seperti siapa yang harus dan tidak harus diundang. Padahal keutuhan G20 harus dipertahankan.

Peran dan Fungsi G20 di Dunia:

2/3

Populasi dunia

85%

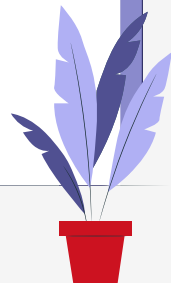
PDB dunia

75%

Perdagangan
dunia

80%

Dari investasi
global



73. Apa Pembahasan Utama Pertemuan Kedua DWG G20?

Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas, selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti menekankan penguatan UMKM menjadi salah satu isu prioritas pertemuan kedua DWG untuk pemulihan ekonomi.

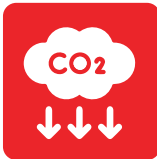


Salah satu strategi dukungan yang dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain, pada 2021 menerbitkan regulasi yang mewajibkan institusi pemerintahan untuk memastikan setidaknya 40 persen dari pengadaan barang dan jasa berasal dari bisnis lokal khusus kelompok UMKM.

3 Fokus Indonesia di Pertemuan Kedua DWG G20



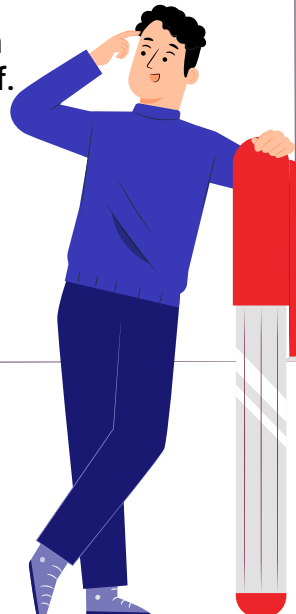
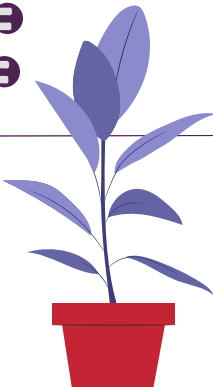
Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM).



Ekonomi hijau dan ekonomi
biru melalui Skema
Pembangunan Rendah Karbon.



Perlindungan
sosial adaptif.



74. Bagaimana Cara Indonesia Memenuhi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan?

Dalam perhelatan *Side Event* G20, pemerintah berbagi cara mencari pembiayaan dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Pemerintah mendukung implementasi skema Pembiayaan Campuran 2.0 yang diharapkan mampu menarik pembiayaan komersial untuk mengisi kebutuhan pembangunan berkelanjutan.



Skema ini diharapkan dapat membantu negara-negara di dunia memenuhi pembiayaan SDGs.

Pembiayaan campuran yang sudah berjalan selama ini berupa kombinasi investasi dari pemerintah dan swasta dalam sejumlah program SDGs.

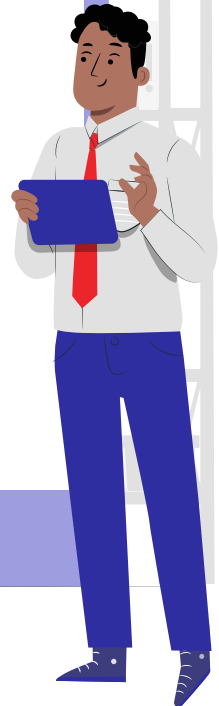


Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) memperkirakan celah pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia mencapai

USD 1 triliun


atau sekitar **Rp 14.600 triliun**
(kurs Rp 14.600/USD).

Sedangkan pembiayaan SDGs secara global meningkat dari **USD 2,5 triliun** menjadi **USD 4,2 triliun per tahun** akibat pandemi Covid-19.



75. Pentingnya Kemampuan *Public Speaking* Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Di Belitung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif meningkatkan kapasitas terutama kemampuan *public speaking*.



Menurutnya, peningkatan kapasitas tidak hanya terhadap kualitas produk saja tapi juga *soft skill* dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terutama kemampuan untuk berkomunikasi (*communication skill*) yang diiringi dengan etos kerja 4AS.



Etos Kerja 4AS

Adalah prinsip etos kerja untuk capai kesuksesan ala Sandiaga Uno yakni:



Kerja keras



Kerja tuntas



Kerja cerdas



Kerja ikhlas

Keris dari Desa Wisata Aeng Tong-tong

Menjadi Suvenir Side Event KTT G20



Desa Wisata Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinobatkan UNESCO sebagai satu-satunya desa wisata dengan empu keris terbanyak di dunia.

Hingga kini, produk kriya tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Aeng Tong-tong. Karenanya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana menjadikan keris sebagai suvenir di *side event* KTT G20.

Sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif, Menparekraf berharap kalangan milenial tertarik dengan keris terutama yang bisa dijadikan suvenir.

17

Sub Sektor Ekonomi Kreatif



Aplikasi



Arsitektur



Desain Komunikasi
Visual



Desain Produk



Desain Interior



Fotografi



Musik



Kriya



Kuliner



Fesyen



Penerbitan



Film, Animasi & Video



Periklanan



Permainan Interaktif



Seni Pertunjukan



Seni Rupa



TV, Radio

Apa Itu B20 Indonesia *Women in Business Action Council* sebagai Bagian dari Presidensi Indonesia di G20?

Ira Noviarti selaku *Chair of B20 Women in Business Action Council (WiBAC)* mengatakan, aspirasi utama WiBAC adalah di masa depan akan lebih banyak perempuan yang memimpin, berpartisipasi, dan memiliki akses ke peluang bisnis dan ekonomi yang lebih baik.



Dunia perlu membuat kebijakan untuk lebih banyak melibatkan perempuan dalam sektor ekonomi. Untuk membahas masalah ini, WiBAC menggelar acara *Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy* pada 17 Juni.



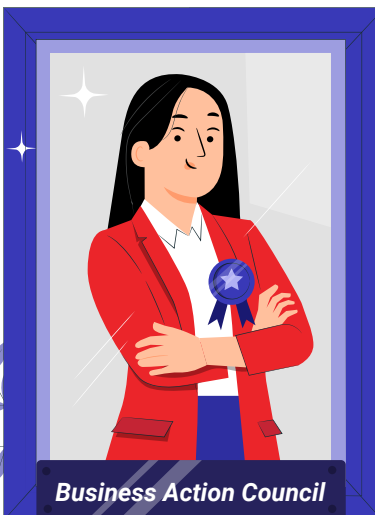
4 Fokus Bahasan dalam *Accelerating Inclusion of Women MSME's in the Global Economy:*

- 1** Memberdayakan kemampuan wirausaha wanita dengan mengembangkan ekosistem yang dapat memberikan akses pada bantuan finansial, regulasi, hingga akses pada bantuan teknis bagi pelaku usaha. Sebagai tindak lanjut, jaringan bisnis perempuan dalam skala global harus terus dikembangkan.
- 2** Mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan, dengan cara mempercepat akses perempuan pada lingkup digital/STEM, serta memperkuat keterampilan untuk mengambil pada posisi-posisi pimpinan yang diperkuat dengan laporan berbasis gender.
- 3** Mendorong lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatkan keamanan kerja bagi pekerja perempuan di sektor perekonomian informal, termasuk di masyarakat pedesaan.
- 4** Membangun kebijakan sistematis untuk menghindari kekerasan berbasis gender dan membantu korban kekerasan.

76. Apa peran *B20 Women in Business Action Council* dalam Memberdayakan dan Mendukung Perempuan dalam Dunia Bisnis?

B20 Indonesia *Women in Business Action Council* adalah kelompok yang mewakili komunitas bisnis di negara G20 yang bertujuan mengangkat peran perempuan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Delegasi yang terlibat adalah perempuan yang menempati posisi eksekutif atau jabatan tinggi di perusahaan multinasional dan organisasi di negara G20 yang terdiri dari 151 pimpinan bisnis dari 26 negara dan 19 industri. Mereka mewakili lebih dari 6,5 juta unit bisnis.



Chair Indonesia di Women in Business Action Council adalah Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Ira Noviarti dan CEO Sintesa, Shinta Widjaja Kamdani.

Lima Usulan Perwakilan B20 *Women in Business Council:*

- 

Mempercepat ketersediaan infrastruktur pendukung bagi pengusaha dan UMKM perempuan bidang keuangan, hukum, dan bantuan kewirausahaan.
- 

Membangun dan memperkuat ketahanan bisnis yang dipimpin perempuan melalui kerja sama lintas batas.
- 

Membangun kemampuan digital tenaga kerja perempuan bidang sains, teknologi dan juga digital.
- 

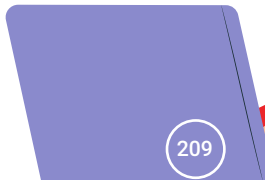
Membangun fondasi yang mendorong partisipasi dan kepemimpinan yang adil dan aman bagi pekerja perempuan, khususnya bidang informal.
- 

Menghilangkan kekerasan berbasis gender dan bantuan pada korban kekerasan gender di tempat kerja.

77. Bagaimana Peran Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Perempuan, Khususnya Pengarusutamaan Gender?

Peran dunia usaha yang dapat dilakukan dalam memberdayakan perempuan dapat dilakukan:

- Melakukan advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender kepada pegawai.
- Memenuhi hak-hak ketenagakerjaan perempuan seperti hak istirahat melahirkan.
- Melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja seperti pelecehan seksual.
- Memaksimalkan potensi perempuan untuk dapat berkembang dengan jenjang karir yang sama seperti laki-laki.
- Memberi upah yang sama antara perempuan dan laki-laki serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan organisasi seperti serikat pekerja.



Kebijakan KemenPPPA dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender:



1 Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja.



2 Pelaksanaan Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).



3 Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Kawasan Industri.



4 Layanan Sahabat Perempuan dan Anak di telepon 08111-129-129 (SAPA 129).

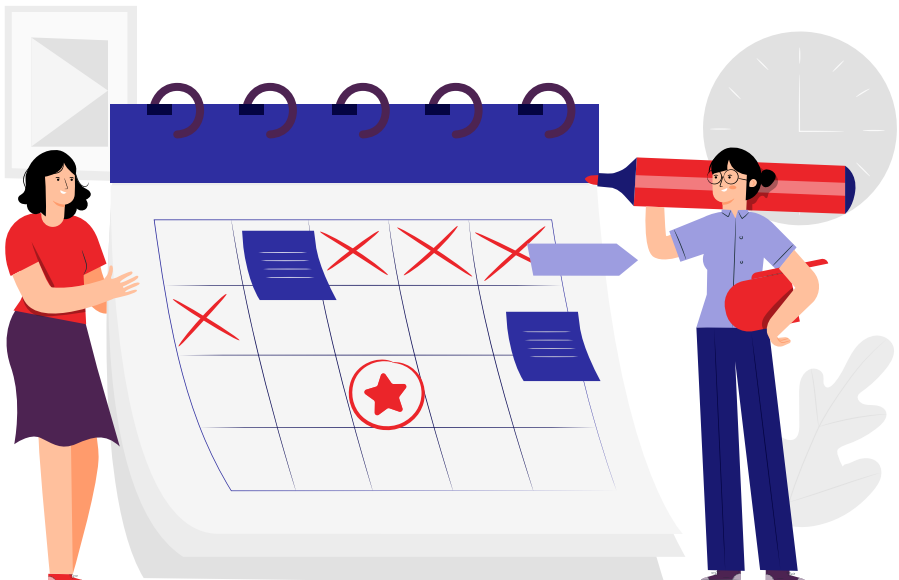


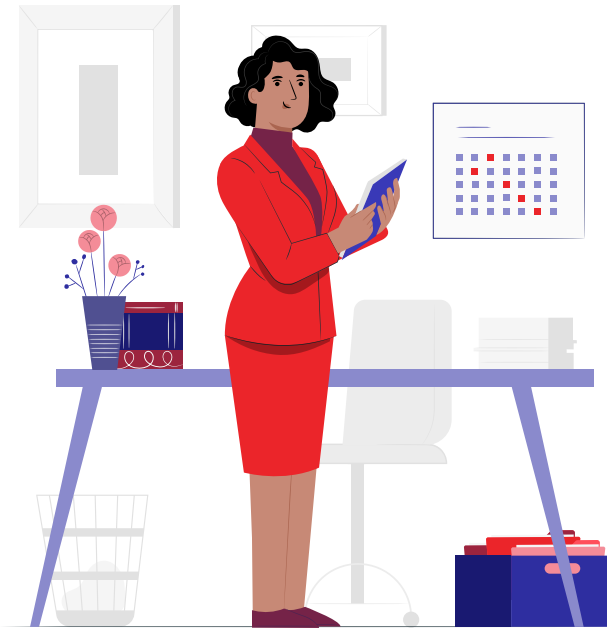
5 Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

78. Bagaimana Perjalanan Penguatan Peran Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi di Dunia?

Berdasarkan laporan Bank Dunia *Women, Business and the Law 2022*, sekitar 2,4 miliar perempuan berusia produktif masih terbelenggu ketidaksetaraan dalam memperoleh kesempatan ekonomi.

Bahkan, peraturan di 178 negara masih membatasi akses penuh perempuan dalam berkegiatan ekonomi. Laporan tersebut juga menyebutkan, sebanyak 86 negara masih menerapkan pembatasan akses pekerjaan terhadap perempuan dan sebanyak 95 negara tidak menjamin kesetaraan upah kerja bagi perempuan.





Kabar baiknya, Bank Dunia mencatat tetap terjadi perbaikan dalam kesetaraan perempuan meski terjadi pandemi global dalam beberapa tahun belakangan ini. Terdapat 23 negara yang mereformasi perundang-undangannya untuk mendukung kemajuan inklusi ekonomi bagi perempuan.

Laporan Bank Dunia *Women, Business and the Law* 2022 mengukur segala bentuk aturan hukum formal di 190 negara yang berdampak terhadap delapan area keterlibatan perempuan dalam ekonomi, yakni mobilitas, tempat bekerja, upah, pernikahan, kehidupan orang tua, kewirausahaan, kepemilikan aset, dan dana pensiun.



Fakta Kesetaraan Gender di Dunia Berdasarkan Catatan Bank Dunia

- 12 Negara Anggota OECD Menjunjung Kesetaraan Hukum bagi Perempuan.
- Hong Kong, Tiongkok Menerapkan Kebijakan Cuti Melahirkan 14 Minggu.
- Armenia, Swiss, dan Ukraina Memberlakukan Kebijakan Uang Cuti Melahirkan bagi Suami.
- Kolombia, Georgia, Yunani, dan Spanyol Menerapkan Kebijakan Pemberian Uang Cuti bagi Ayah maupun Ibu untuk Mengurus Anak Baru Lahir.

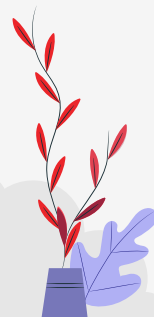
Apa yang Dilakukan Kamboja dan Vietnam dalam Menghapuskan Kesenjangan Gender?



Dalam rilis Bank Dunia atau *World Bank* tanggal 1 Maret 2022 disebutkan, meski ada pandemi, 23 negara berhasil menyempurnakan undang-undang untuk memajukan inklusi ekonomi perempuan di tahun 2021.

Dua dari 23 negara itu adalah Kamboja dan Vietnam. Saat ini Kamboja telah menerapkan kesetaraan gender dalam sistem pensiun, mulai usia yang sama antara laki-laki dan perempuan serta kesetaraan mendapatkan manfaat pensiun penuh. Lalu, Vietnam merupakan salah satu negara yang menghapuskan kesenjangan gender paling cepat selama 20 tahun terakhir.

Dan kini, Vietnam telah menghapus semua bentuk diskriminasi dan pembatasan terhadap perempuan di lapangan pekerjaan.



Alasan Kemdikbudristek Meluncurkan Merdeka Belajar

Merdeka belajar menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tingkat nasional maupun global. Merdeka Belajar adalah salah satu program untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik maupun para guru.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa perguruan tinggi memiliki kemerdekaan dalam menjelajah ilmu yang dibutuhkan sehingga memiliki kompetensi yang bermanfaat dalam pembangunan bangsa. Pemerintah juga membuat sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha, industri (DUDI) dan membentuk kolaborasi ABCFGM (*Academics, Business, Community, Financing, Government, Media*)





Implementasi Kampus Merdeka

Penyelenggara

- Kampus Merdeka Terbuka Nasional (Bisa diakses siapa saja)
- Penyelenggara secara instansi

Pembobotan

- Setara dengan 20 SKS

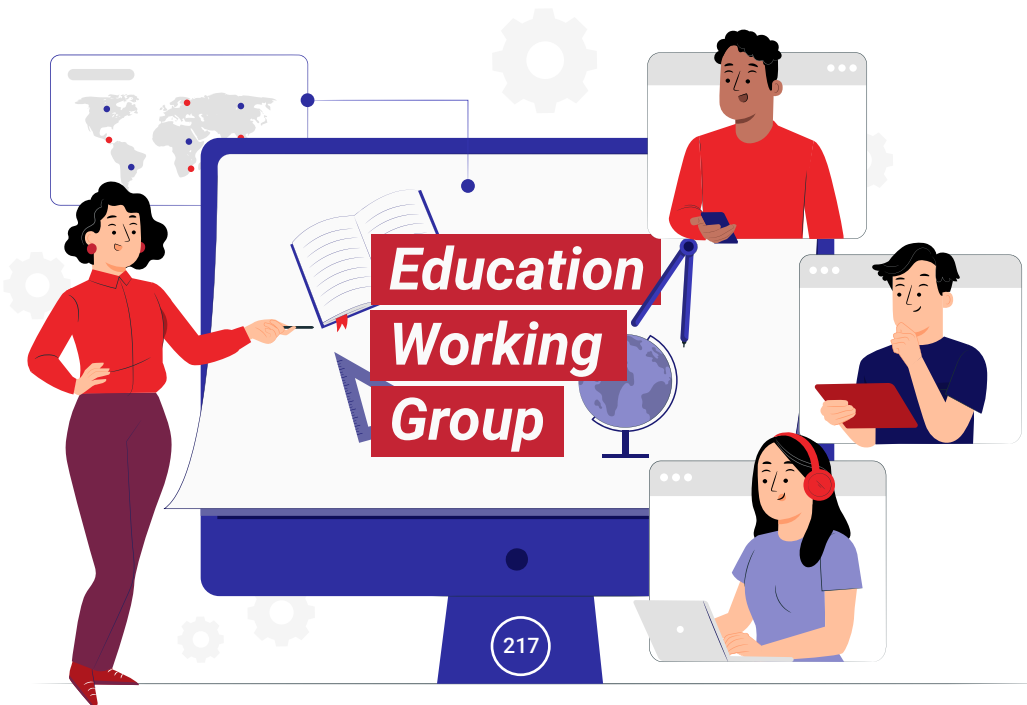
Pertukaran Mahasiswa Merdeka

- Program belajar di kampus lain seluruh Indonesia

79. Apa Hasil Dari Pertemuan Kedua EdWG G20?

Di bawah kepemimpinan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), para delegasi (*Education Working Group/EdWG*) G20 berhasil menyatukan suara akan pentingnya transformasi berbasis gotong royong untuk pemulihan pendidikan.

Terobosan Merdeka Belajar diangkat dalam pertemuan *EdWG* sebagai contoh praktik baik yang menjadi tonggak gotong royong transformasi pendidikan di Indonesia, sekaligus sebagai dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20.



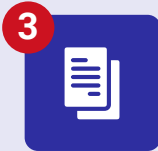
4 Pokok Bahasan Pertemuan Kedua *EdWG* G20



1 Inisiatif Kemendikbudristek untuk memperbaharui komitmen dunia di bidang pendidikan dalam pertemuan Konferensi Transformasi Pendidikan (*Transforming Education Summit/ TES*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations/UN*).



2 Agenda prioritas *EdWG* 20, yakni Pendidikan Berkualitas untuk Semua dan Teknologi Digital dalam Pendidikan.



3 Penyusunan laporan *EdWG* G20.



4 Draft deklarasi tingkat menteri pendidikan.



80. Apa Tindak Lanjut dari Laporan Hasil G20 Bidang Pendidikan?

Selain memimpin penyusunan laporan hasil G20 *EdWG*, Kemendikbudristek juga menginisiasi pembahasan untuk membawa hasil-hasil dari *EdWG* G20 secara lebih luas kepada negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pertemuan Konferensi Transformasi Pendidikan atau *Transforming Education Summit (TES)*.





Tentang *Transforming Education Summit (TES)*

TES merupakan sebuah wadah untuk memobilisasi semangat, komitmen, dan kemauan politik yang lebih besar untuk memulihkan kemunduran pencapaian.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) yang keempat akibat pandemi, menata kembali pendidikan, dan mempercepat kemajuan pendidikan dan perwujudan SDG 2030.

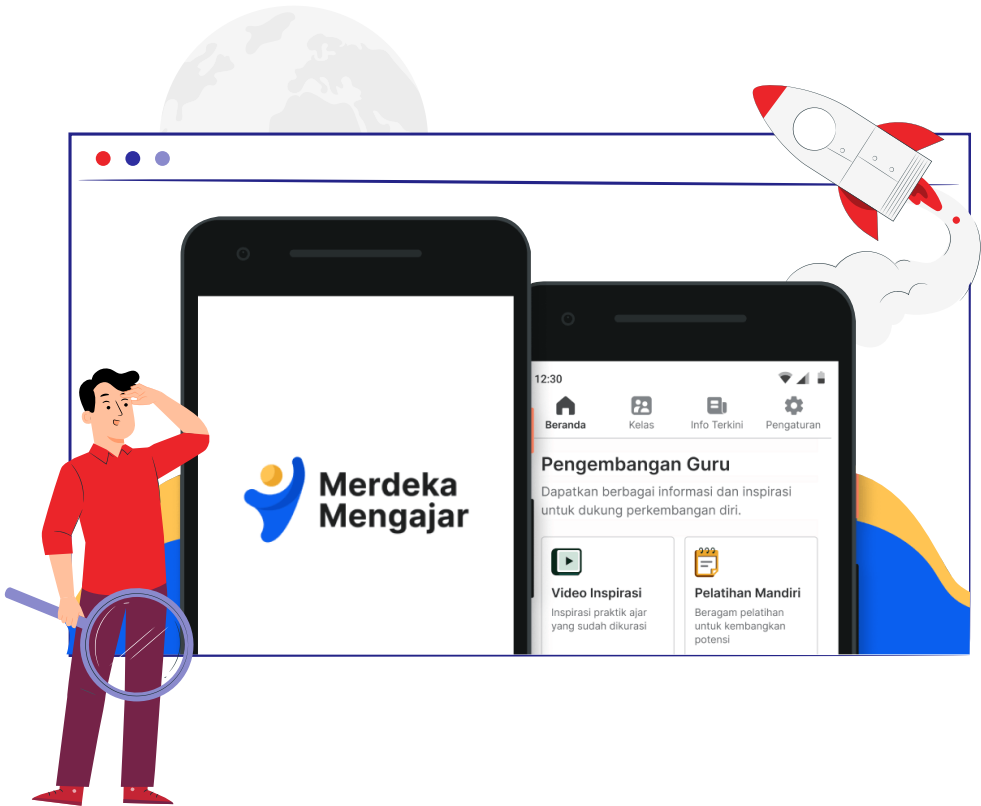
81. Teknologi Semakin Canggih, Apakah Guru Masih Menjadi Satu-satunya Kunci Sukses Pembelajaran?

Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan menjadi isu prioritas kedua dalam Kelompok Kerja Pendidikan G20 atau *Education Working Group (EdWG)* yang dibahas di pertemuan perdana di Yogyakarta, pada Rabu (16/3/2022).

Chair EdWG Iwan Syahril menyebut pemanfaatan teknologi strategis dan tepat guna dalam pendidikan berperan besar dalam membangun kembali pendidikan dan pembelajaran berkualitas.

Namun, teknologi tetap tidak bisa menggantikan peran guru sebagai insan pendidik yang berdiri di garis terdepan.





Platform Merdeka Mengajar

Platform teknologi yang disediakan untuk teman penggerak guru dalam mengajar, belajar dan berkarya.

Platform berisi

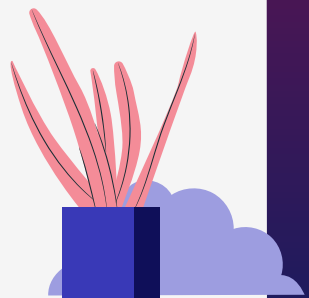
- Asesmen Murid
- Perangkat Ajar
- Pelatihan Mandiri
- Bukti Karya

Menakar Kualitas Pendidikan dari PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan sistem ujian yang diinisiasi *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, untuk mengevaluasi sistem pendidikan di lebih dari 70 negara. Setiap tiga tahun siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains.

PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan dengan pengetahuannya. Ujian PISA terakhir dilakukan pada 2018. Indonesia yang berpartisipasi dalam ujian tersebut mendapatkan skor 371.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan, Indonesia masih memiliki sejumlah PR dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti pemerataan jumlah dan mutu guru.



Meski masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki, Indonesia tercatat mengalami kemajuan dalam jumlah orang bersekolah.

Pada tahun 2000, hanya 39 persen penduduk usia 15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP dan SMA. Sedangkan, pada tahun 2018, angka tersebut meningkat menjadi 85 persen.



82. Apakah Ada Website Resmi G20?

Website resmi G20 bisa dikunjungi melalui URL <https://g20.org>



83. Apa Saja Media Sosial G20?

Follow media sosial G20 untuk berinteraksi dan dapatkan informasi paling baru seputar Presidensi G20.



Akun khusus Presidensi G20 Indonesia



84. Glosarium G20

Berikut ini daftar istilah dalam G20

Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Initiative

Kolaborasi global menyatukan pemerintah, ilmuwan, produsen, bisnis, masyarakat sipil, *philantropist* dan organisasi kesehatan global untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang merata terhadap pengujian, perawatan dan vaksinasi COVID-19.

Arm's Length Principle (ALP)

Prinsip penilaian pada transaksi komersial dan keuangan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga penilaian transaksi tersebut seolah-olah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang bertindak sesuai kepentingannya masing-masing.

Asynchronous Recovery

Kondisi pemulihan ekonomi yang tidak selaras di mana negara-negara maju menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, sedangkan negara berkembang dan berpendapatan rendah pulih lebih lambat.

AUKUS

Pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat yang bertujuan utama untuk membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir di Kawasan Indo-Pasifik.

Automatic Exchange of Information (AEOI)* atau **Pertukaran Informasi Secara Otomatis*

Pertukaran Informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang disusun berdasarkan Standar Pertukaran Informasi Keuangan secara otomatis (*Common Reporting Standard*).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dan perbedaan perlakuan perpajakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan antar negara untuk mengalihkan keuntungan tersebut ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak tanpa disertai adanya substansi ekonomi. Suatu negara berpotensi kehilangan pendapatan pajaknya yang substansial dikarenakan tergerusnya basis penerimaan pajak (*base erosion*) atau karena perpindahan keuntungan (*profit shifting*) ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Dalam jangka panjang dapat mengganggu kesinambungan fiskal suatu negara dalam rangka membiayai pembangunan ekonomi negaranya.

Blended Finance

Pemanfaatan strategis pembiayaan pembangunan (*development finance*) untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang (OECD); Skema keuangan campuran di mana dana dari Pemerintah, dana dari lembaga pembangunan internasional, dan dana filantropi dikombinasikan untuk menarik dan memobilisasi keikutsertaan swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (kemenkeu.go.id).

Communique

Pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang ingin disampaikan kepada publik; biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20.

Compact with Africa (CwA)

Prakarsa G20 pada masa Presidensi G20 Jerman tahun 2017 yang mendorong reformasi makroekonomi, bisnis, dan pembiayaan untuk meningkatkan daya tarik investasi swasta di Afrika.

Countercyclical

Kebijakan yang mengambil pendekatan sebaliknya atau melawan arus siklus bisnis, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang mengalami pertumbuhan pesat, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.

Deliverables

Jenis produk akhir dari setiap agenda G20 yang disusun melalui proses berjenjang dalam struktur pertemuan G20.

Development Finance

Pembiayaan yang digelontorkan dengan tujuan utama untuk kebutuhan pembangunan yang tidak mengharapkan pengembalian modal.

Engagement Group

Kelompok keterlibatan yang terdiri dari peserta non-pemerintah dari setiap anggota G20, sebagai fasilitas dialog dari anggota G20 yang ingin berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan. Kelompok-kelompok ini menyusun rekomendasi kepada pemerintah G20 yang diperhitungkan oleh G20 dan berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan. Terdapat 10 bentuk kelompok keterlibatan yakni, B20, C20, S20, T20, L20, W20, U20, Y20, P20, SAI20.

Exit Policy

Normalisasi kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, yang dilakukan oleh negara-negara untuk keluar dari kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*) yang diterapkan selama menghadapi situasi krisis. Sering juga disebut sebagai *exit strategy*.

Federal Funds Rate (FFR)

Target suku bunga antarbank yang ditetapkan oleh *Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed*, sebagai biaya pinjam meminjam cadangan bank

(bank reserves) yang ditempatkan oleh perbankan umum pada bank sentral Amerika dalam durasi semalam (*overnight*) tanpa jaminan.

Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD)

Pertemuan level deputy dimana hasil pembahasannya akan diperdalam dan dikonkretkan dalam tingkat working group untuk selanjutnya dibawa ke level menteri dan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pertemuan ini digelar secara hibrid dan dihadiri oleh anggota G20, negara terundang, 20 organisasi internasional, dan 3 organisasi regional.

Finance Track

Jalur keuangan atau pembahasan agenda dalam forum G20 yang mencakup pertemuan yang diadakan antara menteri keuangan dan ekonomi, gubernur bank sentral, wakil menteri dan sherpa (perunding) yang ditunjuk oleh masing-masing kementerian ekonomi, terutama berfokus pada masalah ekonomi, keuangan, moneter dan pajak.

Financial Inclusion

Inklusi keuangan atau kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting

Pertemuan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Agenda pembahasan umumnya mengenai *exit strategy* untuk mendukung pemulihan ekonomi, upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19, inklusi keuangan, sistem pembayaran era digital dan keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*) serta perpajakan internasional.

Group of Twenty (G20)

Sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa, bertujuan menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia, dan memiliki peran strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan.

G20 Energy Access Action Plan

Kolaborasi sukarela dalam akses energi (rencana aksi) dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi anggota G20 pada masalah akses energi dengan cara yang fleksibel, memperhitungkan inisiatif yang ada, dan akan fokus pada penambahan nilai melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik yang baik, sesuai keadaan dan perkembangan nasional prioritas.

Global Expenditure Support Fund (GESF)

Dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas.

Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA)

Konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan. Adalah inisiatif G20 yang dikembangkan untuk mendorong kerjasama, tukar menukar pengetahuan dan progres yang berarti dalam mendukung konektivitas global. Host dari GICA adalah *World Bank Hub for Infrastructure and Urban Development* di Singapura.

Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA Hub)

Forum tempat berkumpulnya para unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari \$1 miliar) di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide.

Issues Note

Deskripsi singkat mengenai agenda-agenda untuk menjaga arah diskusi dalam pertemuan G20.

Joint Finance Health Task Force (FHTF)

Satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan dibawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan pencegahan, penyiapan, dan respons pandemik. Berawal dari pemaparan Presiden Joko Widodo, sebagai respons mekanisme persiapan pandemik (*pandemic preparedness*), dalam intervensi pertama KTT G20 terkait penguatan arsitektur kesehatan global melalui kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan antar negara saat terjadi wabah pandemik, dan bagaimana pendanaannya.

Leader's Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu pertemuan tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan.

Ministerial & Deputies Meetings

Pertemuan tingkat menteri dan deputi (sherpa) yang diadakan berdasarkan masing-masing fokus utama forum. Contohnya pada saat finance track, pertemuan tingkat menteri akan dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur sentral setiap negara G20.

Multilateral Development Banks (MDBs)

Institusi yang menyediakan dukungan atau bantuan finansial dan saran profesional untuk berbagai aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang serta memperkuat manajemen ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Nationally Determined Contribution (NDC)

Komitmen setiap negara pihak (parties) terhadap Persetujuan Paris (*Paris Agreement*). Indonesia dalam salah satu agenda prioritas nasionalnya menargetkan untuk mencapai nol emisi (*Net Zero Emission/NZE*) di tahun 2060 sebagai bentuk komitmen penanganan perubahan iklim.

Net Sink Carbon

Penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya.

Nexus

Koneksi atau keterhubungan, atau dalam perpajakan digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang memiliki tanggungan pajak di suatu negara.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Sebuah organisasi internasional yakni Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dengan dua puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

Pillar One G20 Inclusive Framework on BEPS

Salah satu dari solusi dua pilar pajak digital yaitu dengan reformasi sistem perpajakan internasional yang adil dilakukan dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital.

Pillar Two G20 Inclusive Framework on BEPS

Salah satu dari solusi dua pilar pajak digital yang dikenal dengan sebutan *Global anti-Base Erosion (LoBE) rules* yaitu pemastian bahwa semua perusahaan multinasional (*multinational enterprise/MNE*) membayar pajak minimum di semua tempat MNE tersebut beroperasi yang bertujuan agar tidak ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negaranegara yang menghambat penerimaan pajak negara.

Recover Together, Recover Stronger

Tema yang diangkat dalam G20 yang menggambarkan solidaritas dari Indonesia terutama sebagai negara berkembang (*emerging country*) agar pemulihan ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi selama beberapa tahun ini bisa berjalan bersama-sama. Terdapat 3 pilar utama, yaitu mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia (pilar 1), meningkatkan daya tahan perekonomian Indonesia yang semakin tangguh dan berkelanjutan (pilar 2), memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (pilar 3).

Scarring Effects

Kondisi atau dampak dari kerusakan jangka menengah panjang yang terjadi pada struktur perekonomian satu atau lebih negara setelah terjadinya krisis ekonomi yang parah (dalam hal ini Covid-19), yang kemudian berlanjut menjadi resesi. Implikasi kondisi tersebut adalah meningkatnya kegagalan bisnis dan jumlah pengangguran, merosotnya tingkat investasi, dan menyusutnya kapasitas perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi di masa depan.

***Sherpa Track* atau Jalur sherpa**

Pembahasan agenda dalam forum G20 yang fokus pada isu yang lebih luas meliputi perubahan iklim, pembangunan, perdagangan, energi, anti korupsi, dan geopolitik. Agenda prioritas Indonesia akan berfokus pada 3 topik utama, yakni kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi. Terdiri dari 11 *Working Group*, 1 *Initiative Group*, dan 10 *Engagement Group*.

Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*)

Sovereign Wealth Fund (SWF)

Dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk mengusung tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa penguasaan dan pengelolaan aset atau penggunaan serangkaian strategi investasi yang mencakup investasi dalam aset keuangan asing. SWF bisa dibentuk dari surplus neraca pembayaran, operasi mata uang asing resmi, hasil privatisasi, surplus fiskal, dan/atau penerimaan yang dihasilkan dari ekspor komoditas.

Special Drawing Rights (SDR) Allocation

Alokasi hak penarikan khusus melalui aset cadangan internasional yang dibuat oleh IMF untuk melengkapi cadangan resmi devisa negara-negara anggotanya yang memungkinkan anggotanya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada utang domestik atau luar negeri yang lebih mahal untuk membangun cadangannya (SDR dapat menyediakan likuiditas bagi suatu negara). Selain mencegah krisis likuiditas berubah menjadi krisis kepailitan, SDR akan membantu mempertahankan kepercayaan investor dan meningkatkan prospek pemulihan global yang inklusif. Pada pertemuan G20 sebelumnya, anggota G20 dan negara-negara tamu menjanjikan *rechannelling* SDR yang tidak digunakan dan merelokasikannya ke negara-negara rentan yang membutuhkan, sebagai dukungan pemulihan ekonomi, transformasi struktural dan konvergensi pendapatan global.

Sustainable Development Goals (SDG)

Suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Tapering Off

Pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, yang dikeluarkan pada saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas, karena perekonomian mulai pulih yang terutama ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang meningkat.

Tax Haven

Suaka pajak di mana suatu negara atau yurisdiksi menawarkan pengenaan pajak yang rendah bahkan membebaskan dan/atau tidak mengenakan pajak sama sekali kepada perusahaan atau individu asing.

Troika

Sistem presidensi G20 yang terdiri dari presidensi saat ini yang bekerjasama dengan presidensi sebelumnya dan presidensi penerus berikutnya, dimana hal ini dilakukan guna menjaga berlangsungnya pertemuan G20 yang lancar dan berkesinambungan setiap tahunnya (dalam pertemuan G20 2022, Indonesia sebagai presidensi saat ini, Italia sebagai presidensi sebelumnya dan India sebagai presidensi penerus). Secara kolektif, ketiga presidensi tersebut intensif melakukan koordinasi terhadap keseluruhan agenda prioritas G20.

Universal Health Coverage (UHC)

Cakupan kesehatan semesta yang bertujuan memastikan agar semua orang menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa menderita kesulitan keuangan. Ini merupakan bagian integral dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Working Group

Kelompok kerja yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan G20, yang terdiri dari para ahli dan kementerian terkait pada setiap masalah tertentu, bertanggung jawab untuk memimpin analisis mendalam tentang berbagai masalah yang relevan secara internasional. Terdapat 12 macam *working group* di Sherpa Track, yakni AWG, DEWG, EdWG, EWG, TWG, DWG, ETCSWG, ETWG, ECSWG, TIIWG, ACWG, HWG, G20 EMPOWER. Sedangkan di *Finance Track* terdapat 4 *working group* utama, yakni: *Framework Working Group (FWG)*, *International Financial Architecture (IFAWG)*, *Infrastructure Working Group (IWG)*, *Sustainable Finance Working Group (SFWG)*.

QRIS

Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS merupakan inovasi teknologi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan sistem ujian yang diinisiasi *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, untuk mengevaluasi sistem pendidikan di lebih dari 70 negara yang telah berlangsung sejak tahun 2000.

No.	Sumber Informasi
1.	www.g20.org
2.	www.kominfo.go.id
3.	www.antaraneews.com
4.	www.bi.go.id/id/g20/Default.aspx
5.	infopublik.id/kategori/g20
6.	www.indonesia.go.id/g20
7.	www.bps.go.id
8.	www.kumparan.com
9.	www.who.int
10.	www.kemnaker.go.id
11.	www.menlhk.go.id
12.	www.esdm.go.id
13.	www.kemkes.go.id
14.	www.kemdikbud.go.id
15.	www.setkab.go.id
16.	www.kpk.go.id
17.	www.covid19.go.id
18.	www.kemenkeu.go.id
19.	www.bkkbn.go.id
20.	www.kemenkopmk.go.id
21.	www.kemenpppa.go.id
22.	www.worldbank.org
23.	www.oecd.org

disusun dan dikurasi oleh



Informasi Lebih Lanjut

www.g20.org

Kontribusi informasi, data, saran, kritik, dan masukan

email kami di indonesiabaik@kominfo.go.id



g20.org